DAFTAR ISIAN TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Desa: SARWODADI Kecamatan: Pejawaran

Kabupaten: KAB. BANJARNEGARA Provinsi: JAWA TENGAH

Bulan: 1 Tahun: 2023

Nama Pengisi: SUYANTO Pekerjaan: PERANGKAT DESA Jabatan: SEKRETARIS DESA

Kepala Desa / Lurah: BUDI SAMPURNO SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN

UNTUK MENGISI PROFIL DESA/KELURAHAN

Referensi 1: MONOGRAFI DESA Referensi 2: BUKU ADMNISTRASI DESA

Referensi 3: Referensi 4:

I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. Jumlah Penduduk							
Jumlah		Jenis Kelamin					
Julillati		Laki-laki	Perempuan				
Jumlah penduduk tahun ini		997 orang	923 orang				
Jumlah penduduk tahun lalu		972 orang	910 orang				
Persentase perkembangan		2 57 %	1 /13 %				

B. Jumlah Keluarga

B. Guillaii Reidai ga			
Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini	550 KK	44 KK	594 KK
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu	532 KK	40 KK	572 KK
Prosentase Perkembangan	3.38 %	10 %	

II. EKONOMI MASYARAKAT

Α.	Pengangguran
1.	Jumlah angkatan

1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	559 orang
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	95 orang
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	468 orang
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	0 orang
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	0 orang
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	2 orang
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	2 orang

В.	Kesejahteraan	Keluarga
----	---------------	----------

ı	1. Jumlah keluarga prasejahtera	344 keluarga
	2. Jumlah keluarga sejahtera 1	130 keluarga
	3. Jumlah keluarga sejahtera 2	55 keluarga
	4. Jumlah keluarga sejahtera 3	43 keluarga
	5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	22 keluarga
ı	6. Total jumlah kepala keluarga	594 keluarga

III. PRODUK DOMESTIK DESA/KELURAHAN BRUTO

A. SUBSEKTOR PERTANIAN

Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)	Nilai produksi (Rp)	Biaya pemupukan (Rp)	Biaya bibit (Rp)	Biaya obat (Rp)	Biaya lainnya (Rp)
Jagung	18	0.9	97200000	28800000	10800000	5760000	21600000
Cabe	21	1.25	157500000	26040000	18900000	13440000	25200000
Padi sawah	25	1	150000000	22500000	9375000	4000000	30000000

B. SUBSEKTOR PERKEBUNAN

4							
Tananan	Luas Produksi	Hasil Produksi	Nilai produksi	Biaya pemupukan	Biaya bibit	Biaya obat	Biaya lainnya
Tanaman	(Ha)	(Ton/Ha)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Kopi	6	3	72000000	6480000	6000000	6000000	8000000

					Nilai Pak	an Baku va		nan Penolong yg	Jumlah Ternak
Jenis Produksi	Hasil Produ	ıksi	Nilai produksi (Rp)		Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)			ligunakan (Rp)	(Ekor)
Daging		00 1745		20000000		240000000		12000000	25
Madu		10 962		2000000		1000000		1000000	
D. SUBSEKTOR PERIKANAI				<u> </u>		Nilai Bahan F	enolona	Total biaya antara	
Jenis Produksi	Hasil Produksi (Ton/Tahun)	Nilai _I	oroduksi (Rp)	Nilai Baha digunal	an Baku yg kan (Rp)	yg diguna	akan	yang dihabiskan	Jenis usaha perikanan
Mas	0.4		20000000		8000000	(Rp)	2700000	(Rp) 5500000	
Mujair	0.5		17500000		7500000		2500000	5000000	
Lele	0.6		12000000		4800000		1600000	3200000	
E. SEKTOR PERTAMBANGA	N DAN GALIAN								
Total nilai produksi tahun ini	IN DAN GALIAN							Rp. 0,00	
Total nilai bahan baku yang di								Rp. 0,00	
Total nilai bahan penolong yar								Rp. 0,00	
Total biaya antara yang dihabi Jumlah total jenis bahan tamb		ı ada						Rp. 0,00	
Zaman total jonio banan tamb	ang dan gallan yang	uuu						o jemo	
F. SUBSEKTOR KERAJINAN	l								
Total nilai produksi tahun ini								Rp. 0,00	
Total nilai bahan baku yang di Total nilai bahan penolong yar	•							Rp. 0,00 Rp. 0,00	
Total nilal banan penolong yar Total biaya antara yang dihabi								Rp. 0,00	
Total jenis kerajinan rumah tai								0 jenis	
G. SEKTOR INDUSTRI PENC	SOLAHAN								
G.1. Subsektor Industri Pan									
Total nilai produksi tahun ini	<u>. </u>							Rp. 0,00	
Total nilai bahan baku yang di	gunakan							Rp. 0,00	
Total nilai bahan penolong yar								Rp. 0,00	
Total biaya antara yang dihabi								Rp. 0,00	
Total jumlah jenis industri tsb y	yang ada							0 jenis	
H. SUBSEKTOR KEHUTANA Total nilai produksi tahun ini	AN .							Rp. 0,00	
Total nilai bahan baku yang di	gunakan							Rp. 0,00	
Total nilai bahan penolong yar	ng digunakan							Rp. 0,00	
Total biaya antara yang dihabi	skan							Rp. 0,00	
I. SEKTOR PERDAGANGAN	, HOTEL DAN RES	ΓORAN							
I.1. Subsektor Perdagangan	Besar								
Total nilai transaksi	rang ada							Rp. 0,00	
Total nilai aset perdagangan y Total jumlah jenis perdaganga								Rp. 0,00 Rp. 0,00	
Total nilai biaya yang dikeluar								Rp. 0,00	
Total biaya antara lainnya								Rp. 0,00	
I.2. Subsektor Perdagangan	Eceran								
Jumlah total jenis perdaganga								0 jenis	
Total nilai transaksi								Rp. 0,00	
Total nilai biaya yang dikeluar								Rp. 0,00	
Total nilai aset perdagangan e	eceran							Rp. 0,00	
I.3. Subsektor Hotel									
Jumlah total penginapan dan	penyediaan akomod	asi yan	g ada					0 jenis	
Jumlah total pendapatan								Rp. 0,00	
Jumlah total biaya pemelihara								Rp. 0,00	
Jumlah biaya antara yang dike Jumlah total pendapatan yang								Rp. 0,00	
I.4. Subsektor Restoran									
Jumlah tempat penyediaan ko	neumei							0 Unit	

umbih biota pendapanan yang diperoteh Sektor Bangunan/Konstruksi winahi hangunan yang datahan ni ilaya pemeliharaan yang disebuarkan Rep. 0.00 dan diala bangunan yang datahan ni ilaya pemeliharaan yang disebuarkan Rep. 0.00 Sektor Kasungan, Persewaan dan Jasa Perusahaan C. Sektor Kasungan, Persewaan bangunan bukan bank umihan kerjada parakakan bangunan dan tarah umihan kerjada parakakan bangunan dan tarah umihan kerjada parakakan Pepu 0.00 Sektor Kasungan berawaan parakakan Pepu 0.00 Sektor Kasungan bangunan umihan perusahaan pasa Sektor Jasa perusahaan Umihan perusahaan pasa Sektor Jasa perusahaan Umihan perusahaan pasa Sektor Jasa perusahaan umum Umihan perusahaan pasa Sektor Jasa perusahaan pasa perusahaan kepada masyarakat Bela dan perusahaan pasa perusahaan kepada masyarakat Bela dan pendaka jasa pelayanan perentirahah umum Umihan pasa hiburan dan rekrasal Bela dan pendaka jasa pel	701/24, 14.38 Untitled Document	
Sektor Sangunan/Konstrukal umlish bangunan yang ada lahun ini kaya pemeliharan yang disebataran Re, 0.00 lang pemeliharan yang disebataran Re, 0.00	Biaya antara lainnya	Rp. 0,00
Sektor Sangunan/Konstrukal umlish bangunan yang ada lahun ini kaya pemeliharan yang disebataran Re, 0.00 lang pemeliharan yang disebataran Re, 0.00	Jumlah total pendapatan yang diperoleh	Rp. 0.00
umleh bengurann yang ada tahun ini legis permeliharan yang diskelusirkan Rp. 0.00 legis permeliharan yang diskelusirkan Rp. 0.00 kiya partana laminya Rp. 0.00 ci. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Ci. Subsektor Bank Ci. Subsektor Bank Rp. 0.00 ci. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Ci. Subsektor Bank Rp. 0.00 ci. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Ci. Subsektor Bank Rp. 0.00 ci. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Ci. Subsektor Bank Rp. 0.00 ci. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Ci. Subsektor Bank Rp. 0.00 ci. Sektor Keuangan bukan bank Umlah isinahaga keuangan bukan bank Viala transakal iembaga keuangan bukan bank Viala transakal perusahan Viala transakal perusahan Viala transakal perusahan perusahan jasa Viala transakal perusahan perusahan yang diselukan masyarakat Viala transakal perusahan perus		
umleh bengurann yang ada tahun ini legis permeliharan yang diskelusirkan Rp. 0.00 legis permeliharan yang diskelusirkan Rp. 0.00 kiya partana laminya Rp. 0.00 ci. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Ci. Subsektor Bank Ci. Subsektor Bank Rp. 0.00 ci. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Ci. Subsektor Bank Rp. 0.00 ci. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Ci. Subsektor Bank Rp. 0.00 ci. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Ci. Subsektor Bank Rp. 0.00 ci. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Ci. Subsektor Bank Rp. 0.00 ci. Sektor Keuangan bukan bank Umlah isinahaga keuangan bukan bank Viala transakal iembaga keuangan bukan bank Viala transakal perusahan Viala transakal perusahan Viala transakal perusahan perusahan jasa Viala transakal perusahan perusahan yang diselukan masyarakat Viala transakal perusahan perus		
lasys pemeiharaan yang dikeluahan disa patun yang dad Rp. 0.00 disa) aniah bangunan yang ada Rp. 0.00 disa) aniah bangunan yang ada Rp. 0.00 disa) aniah dangunan yang ada Rp. 0.00 disa) aniah dangunan yang ada disaya antara lainnya Rp. 0.00		
Voils nike banguran yang ada Rp. 0.00 kisa antara lainnya Rp. 0.00 C. Subsektor Bank Rp. 0.00 unish interesting perbankan Rp. 1500 000 000,000 unish transaks perbankan Rp. 1500 000 000,000 unish interesting perbankan Rp. 1500 000 000,000 unish berangsak keuangan bukan bank Unit unish berangsak keuangan bukan bank 0 Unit unish berangsak keuangan bukan bank 0 Unit unish berangsak keuangan bukan bank 0 Jenis unish berangsak keuangan bukan bank Rp. 0.00 kaya yang dikelukhan Rp. 0.00 3. Subsektor Sawa Bangunan 0 Unit unish usaha persewaan bargunan dan tanah 0 unit unish usaha persewaan bargunan dan tanah 0 unit unish perusahan Rp. 0.00 kaya yang dikelukhan Rp. 0.00 kaya yang dikelukhan Rp. 0.00 kaya yang dikelukhan Rp. 0.00		0 unit
lasya antrau lainnya S. Sektor Kouangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (1. Subbektor Bank Windan haransaksi perbarikan Windan haransaksi perbarikan haransaksi windan haransaksi	Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan	Rp. 0,00
S. Sektor Keuangan, Persewan dan Jasa Perusahaan 1.1. Subsektor Bank Umlah ternaskis perbankan Re. 80.00 umlah ternaskis perbankan Re. 1500 000,000,000 Umlah ternaskis perbankan Umlah kepiay yang dikeluarkan Umlah kepiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Re. 0.00 S. Subsektor Sewa Bangunan Umlah jusaha persewaan bangunan dan tanah O uml Otal ritin persewaan yang dicepal Re. 0.00 A. Subsektor Sewa Bangunan Umlah persewaan yang dicepal Re. 0.00 A. Subsektor Jasa Perusahaan Umlah perusahanan jasa O Janis Re. 0.00 S. Subsektor Jasa Perusahaan Umlah perusahanan jasa O Janis Re. 0.00 S. Settron Jasa Perusahaan Umlah perusahanan jasa O Janis Re. 0.00 S. Settron Jasa Perusahaan Umlah perusahanan jasa O Janis Re. 0.00 S. Settron Jasa Perusahaan Re. 0.00 S. Settron Jasa Perusahaan umum Umlah jenis jasa pelayanan permerintahan kepada masyarakat Umlah janis jasa pelayanan permerintahan kepada masyarakat D uml Re. 0.00 Denis Re.	Total nilai bangunan yang ada	Rp. 0,00
S. Sektor Keuangan, Persewan dan Jasa Perusahaan 1.1. Subsektor Bank Umlah ternaskis perbankan Re. 80.00 umlah ternaskis perbankan Re. 1500 000,000,000 Umlah ternaskis perbankan Umlah kepiay yang dikeluarkan Umlah kepiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Re. 0.00 S. Subsektor Sewa Bangunan Umlah jusaha persewaan bangunan dan tanah O uml Otal ritin persewaan yang dicepal Re. 0.00 A. Subsektor Sewa Bangunan Umlah persewaan yang dicepal Re. 0.00 A. Subsektor Jasa Perusahaan Umlah perusahanan jasa O Janis Re. 0.00 S. Subsektor Jasa Perusahaan Umlah perusahanan jasa O Janis Re. 0.00 S. Settron Jasa Perusahaan Umlah perusahanan jasa O Janis Re. 0.00 S. Settron Jasa Perusahaan Umlah perusahanan jasa O Janis Re. 0.00 S. Settron Jasa Perusahaan Re. 0.00 S. Settron Jasa Perusahaan umum Umlah jenis jasa pelayanan permerintahan kepada masyarakat Umlah janis jasa pelayanan permerintahan kepada masyarakat D uml Re. 0.00 Denis Re.	Biaya antara lainnya	Rp. 0,00
Cl. Subsektor Bank Rp. 0.00		
Cl. Subsektor Bank Rp. 0.00	K Soktor Kouangan Dersowaan dan Jasa Derusahaan	
umlah biaraski perbankan PR 80.00 umlah biaya yang dikeluarkan PR 1500.000.000,00 Umlah biaya yang dikeluarkan Umlah benbaga keuangan bukan bank Umlah benbaga keuangan bukan bank Umlah benbaga keuangan bukan bank Umlah kegiatan jasa perunjang lembaga keuangan bukan bank PR 90.00 lakaya yang dikeluarkan PR 90.00 lakaya antara yang dikeluarkan PR 90.00 laka tarakaki yang palayayana perorangan dan rumah tangga lakaya antara yang dikeluarkan PR 90.00 lakaya antara yang dikeluarkan PR 90.00 lakaya antara yang dikeluarkan PR 90.00 lakaya antara		
umlah hisi teranaksi perbankan Rp. 1.500.000.000,00 (Windows) Rp. 50.000.000,00 (Windows) Rp. 50.000 (Windows) Rp. 60.000 (Windows) Rp.	K.1. Subsektor Bank	
Rp. 50.000.000,00	Jumlah transaksi perbankan	Rp. 80,00
(2.2. Subsektor Jembaga keuangan bukan bank untiah lambaga keuangan bukan bank untiah lambaga keuangan bukan bank untiah lambaga keuangan bukan bank (Jumlah nilai transaksi perbankan	Rp. 1.500.000.000,00
(2.2. Subsektor Jembaga keuangan bukan bank untiah lambaga keuangan bukan bank untiah lambaga keuangan bukan bank untiah lambaga keuangan bukan bank (Jumlah biaya yang dikeluarkan	Rp. 50.000.000,00
umlah lembaga keuangan bukan bank Unlish Registra jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Ulair transaksi kembaga keuangan bukan bank Rija 0,00 Rijasa yang dikeluarkan Rijasa yang dikeluarkan Unlish usaha persewan bangunan dan tanah Unlish usaha persewan bangunan dan tanah Unlish usaha persewan yang dicapai Isaya yang dikeluarkan Rijasa dan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Rijasa yang dikeluarkan dan pelayanan Rijasa yang dikeluarkan dan rekreasi Rijasa yang dikeluarkan dan rekreasi Rijasa yang dikeluarkan Rijasa biburan dan rekreasi Rijasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Rijasa biburan dan rekreasi Rijasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Rijasa yang dikeluarkan Rijasa biburan dan rekreasi Rijasa biburan dan rekreasi Rijasa pelayanan persemgan dan rumah tangga Rijasa yang dikeluarkan Rijasa biburan dan rekreasi Rijasa pelayanan persemgan dan rumah tangga Rijasa yang dikeluarkan Rijasa pelayanan persemgan dan rumah tangga Rijasa yang dikeluarkan Rijasa pelayanan persemgan dan rumah tangga Rijasa yang dikeluarkan Rijasa pelayanan persemgan dan rumah tangga Rijasa yang dikeluarkan Rijasa pelayanan persemgan dan rumah tangga Rijasa yang dikeluarkan Rijasa pelayanan persemgan dan rumah tangga Rijasa yang dikeluarkan Rijasa pelayanan persemgan dan rumah tangga Rijasa yang dikeluarkan Rijasa pelayanan persemgan dan rumah tangga Rijasa yang dikeluarkan Rijasa pelayanan persemgangkuan dan rumah tangga Rijasa pelayanan p		
umlah lembaga keuangan bukan bank Unlish Registra jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Ulair transaksi kembaga keuangan bukan bank Rija 0,00 Rijasa yang dikeluarkan Rijasa yang dikeluarkan Unlish usaha persewan bangunan dan tanah Unlish usaha persewan bangunan dan tanah Unlish usaha persewan yang dicapai Isaya yang dikeluarkan Rijasa dan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Rijasa yang dikeluarkan dan pelayanan Rijasa yang dikeluarkan dan rekreasi Rijasa yang dikeluarkan dan rekreasi Rijasa yang dikeluarkan Rijasa biburan dan rekreasi Rijasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Rijasa biburan dan rekreasi Rijasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Rijasa yang dikeluarkan Rijasa biburan dan rekreasi Rijasa biburan dan rekreasi Rijasa pelayanan persemgan dan rumah tangga Rijasa yang dikeluarkan Rijasa biburan dan rekreasi Rijasa pelayanan persemgan dan rumah tangga Rijasa yang dikeluarkan Rijasa pelayanan persemgan dan rumah tangga Rijasa yang dikeluarkan Rijasa pelayanan persemgan dan rumah tangga Rijasa yang dikeluarkan Rijasa pelayanan persemgan dan rumah tangga Rijasa yang dikeluarkan Rijasa pelayanan persemgan dan rumah tangga Rijasa yang dikeluarkan Rijasa pelayanan persemgan dan rumah tangga Rijasa yang dikeluarkan Rijasa pelayanan persemgan dan rumah tangga Rijasa yang dikeluarkan Rijasa pelayanan persemgan dan rumah tangga Rijasa yang dikeluarkan Rijasa pelayanan persemgangkuan dan rumah tangga Rijasa pelayanan p	K 2 Subsoktor lombaga koyangan bukan bank	
untlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank 0.Jenis kajar yang dikebuarkan Rp. 0.00 K.3. Subsektor Sewa Bangunan Np. 0.00 umlah usaha persewaan bangunan dan tanah 0 unt dota nilali persewaan bangunan dan danah 0 unt dota nilali persewaan yang dicapai Rp. 0.00 laya yang dikeluarkan Rp. 0.00 laya yang dikeluarkan Rp. 0.00 laya salainnya Rp. 0.00 4. Subsektor Jasa Perusahaan Rp. 0.00 untlah perusahaan jasa 0 Jenis silai transaksi perusahaan jasa Rp. 0.00 silaya yang dikeluarkan Rp. 0.00 untlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat 0 unit ulilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat 0 unit ulilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Rp. 0.00 silaya yang dikeluarkan dalam pelayanan Rp. 0.00 2. Subsektor jasa swasta Rp. 0.00 untlah jenis jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat 0 jenis		0.11 "
Age		1
Subsektor Sewa Bangunan Sumbana Bangunan dan tanah Ounit		0 Jenis
Umlah usaha persewaan bangunan dan tanah Umlah usaha persewaan bangunan dan tanah Ola Inital persewaan yang dicapai Isaya yang dikulauraha Rp. 0.00 Isaya yang dikulaurahan jasa Ola Isaya yang dikulaurahan jasa Rp. 0.00 Isaya yang dikulaurahan jasa Isaya yang dikulaurahan yang dikulaurahan yang dikulaurahan pemerintahan umum Umlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Isaya yang dikulaurahan dalam pelayanan Rp. 0.00 Isaya yang dikulaurahan dalam penjayanan Rp. 0.00 Isaya yang dikulaurahan dalam pelayanan Rp. 0.00 Isaya yang dikulaurahan dalam pelayanan Rp. 0.00 Isaya yang dikulaurahan dalam penjayanan yenerintahan kepada masyarakat Umlah janis jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Umlah janis jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Umlah janis jasa pelayanan sosial Rp. 0.00 Isaya yang dikeluarkan Rp. 0.00 Isaya yang dikeluarkan Rp. 0.00 Isaya yang dikeluarkan Rp. 0.00 Isaya antara yang dikeluarkan	Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank	Rp. 0,00
umlah usaha persewaan bangunan dan tanah Olan lila persewaan yang dicapai Rp. 0.00 A.4. Subsektor Jasa Perusahaan Umlah perusahaan jiasa Olan isilalia transakis prusahaan jiasa Rp. 0.00 Rp.	Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
umlah usaha persewaan bangunan dan tanah Olan lila persewaan yang dicapai Rp. 0.00 A.4. Subsektor Jasa Perusahaan Umlah perusahaan jiasa Olan isilalia transakis prusahaan jiasa Rp. 0.00 Rp.		
umlah usaha persewaan bangunan dan tanah Olan lila persewaan yang dicapai Rp. 0.00 A.4. Subsektor Jasa Perusahaan Umlah perusahaan jiasa Olan isilalia transakis prusahaan jiasa Rp. 0.00 Rp.	K 3 Subsektor Sewa Bangunan	
Olan hilal persewaan yang dicapali isiwa yang dikeluarkan Rp. 0.00 isiway yang dikeluarkan Rp. 0.00 Rp		0
liary ayang dikeluarkan Rp. 0,00 A.4. Subsektor Jasa Perusahaan Illai transaksi perusahaan jasa Illai transaksi perusahaan jasa Illai transaksi perusahaan jasa Rp. 0,00 Illai transaksi perusahaan jasa Rp. 0,00 Illai transaksi perusahaan jasa Rp. 0,00 Illai transaksi pelayanan jasa Illai transaksi pelayanan pemerintahan umum Illai janis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Rp. 0,00 Illai transaksi pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Illai transaksi pelayanan sosial illai transaksi pelayanan sosial Illai transaksi pelayanan sosial Illai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Illai transaksi usaha jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Illai transaksi pengangkutan Illai transaksi pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan ungalidanau/penyeberangan Illai transaksi pengangkutan Illai total transaksi pengangkutan Illai total transaksi pengangkutan		
Rp. 0,00 (A. Subsektor Jasa Perusahaan umlah perusahaan jasa Jenis iliali tansaksi perusahaan jasa Rp. 0,00 laya yang dikeluarkan Rp. 0,00 SEKTOR JASA-JASA A. Subsektor jasa pemerintahan umum umlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Rp. 0,00 laya yang dikeluarkan Rp. 0,00 SEKTOR JASA-JASA 4. Subsektor jasa pemerintahan umum umlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Rp. 0,00 laya yang dikeluarkan dalam pelayanan Rp. 0,00 laya yang dikeluarkan dalam pelayanan Rp. 0,00 laya yang dikeluarkan dalam pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Umlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Umlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Umlah jenis jasa hiburan dan rekreasi Umlah jenis jasa hiburan dan rekreasi Umlah jenis jasa hiburan dan rekreasi Iliali tansaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Iliali tansaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Iliali tansaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Umlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp. 0,00 A. Subsektor Jasa Perorangan dan rumah tangga Rp. 0,00 A. Subsektor Jasa perorangan dan rumah tangga Rp. 0,00 A. Subsektor Jasa perorangan dan rumah tangga Rp. 0,00 A. Subsektor Jasa perorangan dan rumah tangga Rp. 0,00 A. SekTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI A. Subsektor Angkutan Umlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan unjalidanau/penyeberangan Umlah total kendaraan angkutan Iliali total tiransaksi pengangkutan Rp. 9,000,000,000 Iliali total tiransaksi pengangkutan		
K.4. Subsektor Jasa Perusahaan umlah perusahaan jasa lilai transaksi perusahaan jasa Rp. 0.00 lilaya yang dikebuarkan Rp. 0.00 lilaya yang dikebuarkan Rp. 0.00 SEKTOR JASA-JASA .1. Subsektor jasa pemerintahan umum umlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Rp. 0.00 lilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Rp. 0.00 lilai saya yang dikeluarkan dalam pelayanan 2. Subsektor jasa swasta umlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat lilai aset produksi jasa pelayanan sosial Rp. 0.00 lilai saya yang dikeluarkan Rp. 0.00 lilai saya sanda saha jasa hiburan dan rekreasi umlah jenis jasa hiburan dan rekreasi umlah jenis jasa hiburan dan rekreasi umlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga umlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga lilai asat jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp. 0.00 lilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp. 0.00 lilai arasaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp. 0.00 lilai arasaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga A. Subsektor Angkutan umlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan umlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan umlah total transaksi pengangkutan lilai itansaksi jengangkutan Rp. 1.000,000,000 lilai total transaksi pengangkutan Rp. 9.000,000,000	Biaya yang dikeluarkan	<u> </u>
umlah penusahaan jasa lilai transaksi perusahaan jasa Rp. 0.00 lilaiya yang dikeluarkan Rp. 0.00 lilaiya yang dikeluarkan Rp. 0.00 SEKTOR JASA-JASA .1. Subsektor jasa pemerintahan umum umlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat lilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Rp. 0.00 lilaiya yang dikeluarkan dalam pelayanan Rp. 0.00 .2. Subsektor jasa swasta umlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat lilai aser produksi jasa pelayanan sosial Rp. 0.00 Bilaya yang dikeluarkan Rp. 0.00 Bilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi lilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Rp. 0.00 Bilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Rp. 0.00 A. Subsektor Jasa Perorangan dan rumah tangga Umlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp. 0.00 A. Subsektor Jasa Perorangan dan rumah tangga Rp. 0.00 A. Subsektor Jasa Perorangan dan rumah tangga Rp. 0.00 A. Subsektor Jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp. 0.00 A. Subsektor Jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp. 0.00 A. Sektror Angkutan Umlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp. 0.00 A. Sektror Angkutan Umlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan ungalidanau/penyeberangan Umlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan ungalidanau/penyeberangan Umlah jenis kegiatan pengangkutan Rp. 1. Unit Rp. 1. Subsektor Angkutan Rp. 9.000.000,00	Biaya lainnya	Rp. 0,00
umlah penusahaan jasa lilai transaksi perusahaan jasa Rp. 0.00 lilaiya yang dikeluarkan Rp. 0.00 lilaiya yang dikeluarkan Rp. 0.00 SEKTOR JASA-JASA .1. Subsektor jasa pemerintahan umum umlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat lilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Rp. 0.00 lilaiya yang dikeluarkan dalam pelayanan Rp. 0.00 .2. Subsektor jasa swasta umlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat lilai aser produksi jasa pelayanan sosial Rp. 0.00 Bilaya yang dikeluarkan Rp. 0.00 Bilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi lilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Rp. 0.00 Bilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Rp. 0.00 A. Subsektor Jasa Perorangan dan rumah tangga Umlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp. 0.00 A. Subsektor Jasa Perorangan dan rumah tangga Rp. 0.00 A. Subsektor Jasa Perorangan dan rumah tangga Rp. 0.00 A. Subsektor Jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp. 0.00 A. Subsektor Jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp. 0.00 A. Sektror Angkutan Umlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp. 0.00 A. Sektror Angkutan Umlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan ungalidanau/penyeberangan Umlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan ungalidanau/penyeberangan Umlah jenis kegiatan pengangkutan Rp. 1. Unit Rp. 1. Subsektor Angkutan Rp. 9.000.000,00		
umlah penusahaan jasa lilai transaksi perusahaan jasa Rp. 0.00 lilaiya yang dikeluarkan Rp. 0.00 lilaiya yang dikeluarkan Rp. 0.00 SEKTOR JASA-JASA .1. Subsektor jasa pemerintahan umum umlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat lilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Rp. 0.00 lilaiya yang dikeluarkan dalam pelayanan Rp. 0.00 .2. Subsektor jasa swasta umlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat lilai aser produksi jasa pelayanan sosial Rp. 0.00 Bilaya yang dikeluarkan Rp. 0.00 Bilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi lilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Rp. 0.00 Bilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Rp. 0.00 A. Subsektor Jasa Perorangan dan rumah tangga Umlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp. 0.00 A. Subsektor Jasa Perorangan dan rumah tangga Rp. 0.00 A. Subsektor Jasa Perorangan dan rumah tangga Rp. 0.00 A. Subsektor Jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp. 0.00 A. Subsektor Jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp. 0.00 A. Sektror Angkutan Umlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp. 0.00 A. Sektror Angkutan Umlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan ungalidanau/penyeberangan Umlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan ungalidanau/penyeberangan Umlah jenis kegiatan pengangkutan Rp. 1. Unit Rp. 1. Subsektor Angkutan Rp. 9.000.000,00	K 4 Subsaktor Jasa Parusahaan	
illai transaksi perusahaan jasa jasap ang dikeluarkan Rp. 0.00 jasya yang dikeluarkan Rp. 0.00 SEKTOR JASA-JASA A.1. Subsektor jasa pemerintahan umum umlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat lilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Rp. 0.00 jasya yang dikeluarkan dalam pelayanan Rp. 0.00 Sektor jasa swasta Demarkan pemerintahan kepada masyarakat Rp. 0.00 Sektor jasa swasta Demarkan pemerintahan kepada masyarakat Rp. 0.00 Sektor jasa swasta Demarkan pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Demarkan pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Demarkan pelayanan sosial Rp. 0.00 Sektor jasa swasta Demarkan pelayanan sosial Rp. 0.00 Sektor jasa swasta Demarkan pelayanan sosial Rp. 0.00 Sektor jasa swasta Demarkan pelayanan sosial Rp. 0.00 Sektor jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Demarkan Rp. 0.00 Sektor jasa hiburan dan rekreasi Demarkan Rp. 0.00 Sektor jasa hiburan dan rekreasi Sektor jasa pelayanan perorangan dan rekreasi Rp. 0.00 Sektor jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Demarkan Rp. 0.00 Sektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga Demarkan Rp. 0.00 Sektor Jasa Perorangan dan rumah tangga Rp. 0.00 Sektor Jasa Perorangan dan rumah tangga Rp. 0.00 Sektor Angkutan Rp. 0.00 Sektor Angkutan Dan KOMUNIKASI M.1. Subsektor Angkutan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan ungalidanau/penyeberangan umlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan ungalidanau/penyeberangan umlah total tendaraan angkutan Rp. 1. Unit Rp. 15.000.000,00 Sektor Angkutan Pp. 1. Unit Rp. 15.000.000,00 Sektor Angkutan Pp. 2. Sektor Angkutan Rp. 9.000.000,00 Sektor Angkutan Pp. 2. Sektor Angkutan Pp		0.1
ilaya yang dikeluarkan Rp. 0.00 Rp. 0.0	·	1 1
Rp. 0.00 SEKTOR JASA-JASA .1. Subsektor jasa pemerintahan umum umlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat (iliai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Rp. 0.00 jaiyay yang dikeluarkan dalam pelayanan Rp. 0.00 2. Subsektor jasa swasta umlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Rp. 0.00 jenis lilai aset produksi jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Rp. 0.00 jaiyay yang dikeluarkan Rp. 0.00 jaiyay ang dikeluarkan Rp. 0.00 jaiyay ang dikeluarkan Rp. 0.00 Jenis umlah jenis jasa hiburan dan rekreasi umlah jenis jasa hiburan dan rekreasi umlah jenis jasa pelayanan yeng dikeluarkan Rp. 0.00 A. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga umlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga uliai transaksi usaha jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp. 0.00 iliai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp. 0.00 A. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI A.1. Subsektor Angkutan umlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan umlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan umlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan umlah jenis kegiatan pengangkutan lilai total transaksi pengangkutan Rp. 9.000.000,000,000		
L1. Subsektor jasa pemerintahan umum umlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat umlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Rp. 0.00 Rp. 0.00 Rp. 0.00 Rp. 0.00 .2. Subsektor jasa swasta umlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat iliai izer produksi jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat iliai aset produksi jasa pelayanan sosial Rp. 0.00 iliaya yang dikeluarkan Rp. 0.00 .3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi umlah jenis jasa hiburan dan rekreasi iliai transaksi usaha jasa pelayanan dan rekreasi iliai transaksi usaha jasa pelayanan dan rekreasi Rp. 0.00 A. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga umlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga iliai set jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp. 0.00 iliaiya antara yang dikeluarkan Rp. 0.00 A. Sektor Angkutan dan rekreasi A. Subsektor Angkutan In Jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan umlah lenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan umlah tangal umlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan umlah tangal umlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan ungal-danau-penyeberangan umlah jenis kegiatan pengangkutan Rp. 15.000.000,00 Rp. 0.00	Biaya lainnya	Rp. 0,00
L1. Subsektor jasa pemerintahan umum umlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat umlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Rp. 0.00 Rp. 0.00 Rp. 0.00 Rp. 0.00 .2. Subsektor jasa swasta umlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat iliai izer produksi jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat iliai aset produksi jasa pelayanan sosial Rp. 0.00 iliaya yang dikeluarkan Rp. 0.00 .3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi umlah jenis jasa hiburan dan rekreasi iliai transaksi usaha jasa pelayanan dan rekreasi iliai transaksi usaha jasa pelayanan dan rekreasi Rp. 0.00 A. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga umlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga iliai set jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp. 0.00 iliaiya antara yang dikeluarkan Rp. 0.00 A. Sektor Angkutan dan rekreasi A. Subsektor Angkutan In Jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan umlah lenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan umlah tangal umlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan umlah tangal umlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan ungal-danau-penyeberangan umlah jenis kegiatan pengangkutan Rp. 15.000.000,00 Rp. 0.00		
L1. Subsektor jasa pemerintahan umum umlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat umlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Rp. 0.00 Rp. 0.00 Rp. 0.00 Rp. 0.00 .2. Subsektor jasa swasta umlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat iliai izer produksi jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat iliai aset produksi jasa pelayanan sosial Rp. 0.00 iliaya yang dikeluarkan Rp. 0.00 .3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi umlah jenis jasa hiburan dan rekreasi iliai transaksi usaha jasa pelayanan dan rekreasi iliai transaksi usaha jasa pelayanan dan rekreasi Rp. 0.00 A. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga umlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga iliai set jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp. 0.00 iliaiya antara yang dikeluarkan Rp. 0.00 A. Sektor Angkutan dan rekreasi A. Subsektor Angkutan In Jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan umlah lenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan umlah tangal umlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan umlah tangal umlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan ungal-danau-penyeberangan umlah jenis kegiatan pengangkutan Rp. 15.000.000,00 Rp. 0.00	I SEKTOR JASA-JASA	
umlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat lilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Rp. 0,00		
A. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga umlah jenis kagiatan jesa pelayanan perorangan dan rumah tangga lilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga lilai atransaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga lilai transaksi pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan ungali/danau/penyeberangan lumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan ungali/danau/penyeberangan lumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan lumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan lumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan lumlah jenis k	L.1. Subsektor jasa pemerintahan umum	
Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan Rp. 0,00 L2. Subsektor jasa swasta Lumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Rp. 0,00 Biaya yang dikeluarkan Rp. 0,00 Rp. 0,00,00 Rp. 0,00	Jumlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat	0 unit
Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan Rp. 0,00 L2. Subsektor jasa swasta Lumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat Rp. 0,00 Biaya yang dikeluarkan Rp. 0,00 Rp. 0,00,00 Rp. 0,00	Nilai transaksi nalayanan nomorintahan kanada masyarakat	Pn 0.00
2. Subsektor jasa swasta umlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat iliai aset produksi jasa pelayanan sosial Rp. 0,00 Rp. 0	<u> </u>	
tumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat 0 jenis Rp. 0,00 Rp.	Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan	Rp. 0,00
tumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat 0 jenis Rp. 0,00 Rp.		
Aliai aset produksi jasa pelayanan sosial Rp. 0,00 Rp.	L.2. Subsektor jasa swasta	
Aliai aset produksi jasa pelayanan sosial Rp. 0,00 Rp.	Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat	0 ienis
Biaya yang dikeluarkan Rp. 0,00		•
3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi umlah jenis jasa hiburan dan rekreasi dilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Rp. 0,00 Biaya antara yang dikeluarkan Rp. 0,00 A. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga umlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga dilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp 0,00 Biaya antara yang dikeluarkan Rp 0,00 Biaya antara yang dikeluarkan Rp 0,00 A. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI umlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan ungai/danau/penyeberangan umlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan ungai/danau/penyeberangan umlah total kendaraan angkutan Rp 15.000.000,00 Rp 9.000.000,00 Rp 9.000.000,00		<u> </u>
umlah jenis jasa hiburan dan rekreasi 0 jenis dilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Rp. 0,00 Biaya antara yang dikeluarkan Rp. 0,00 4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga dumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp 0,00 dilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp 0,00 dilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp 0,00 dilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp 0,00 dilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp 0,00 dilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp 0,00 M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI M.1. Subsektor Angkutan umlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan ungai/danau/penyeberangan umlah total kendaraan angkutan 1 Unit umlah total kendaraan angkutan Rp 15.000.000,00 dilai total biaya yang dikeluarkan Rp 9.000.000,00	Diaya yang dikeluarkan	κρ. 0,00
umlah jenis jasa hiburan dan rekreasi 0 jenis dilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Rp. 0,00 Biaya antara yang dikeluarkan Rp. 0,00 4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga dumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp 0,00 dilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp 0,00 dilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp 0,00 dilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp 0,00 dilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp 0,00 dilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp 0,00 M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI M.1. Subsektor Angkutan umlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan ungai/danau/penyeberangan umlah total kendaraan angkutan 1 Unit umlah total kendaraan angkutan Rp 15.000.000,00 dilai total biaya yang dikeluarkan Rp 9.000.000,00		
Allai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Rp. 0,00 Rp. 0,0	L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi	
Allai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi Rp. 0,00 Rp. 0,0	Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi	0 jenis
Siaya antara yang dikeluarkan Rp. 0,00 A. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga umlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga iliai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp 0,00 iliai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp 0,00 Rp 0,00 A. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI A.1. Subsektor Angkutan umlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan ungal/danau/penyeberangan umlah total kendaraan angkutan 1 Unit Rp 15.000.000,00 Rp 9.000.000,000 Rp 9.000.000,000		
4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga umlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	·	·
tumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp 0,00 Aliai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp 0,00 Biaya antara yang dikeluarkan Rp 0,00 A. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI A.1. Subsektor Angkutan Lumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan ungai/danau/penyeberangan Lumlah total kendaraan angkutan Lunit Rp 15.000.000,00 Rp 9.000.000,00 Rp 9.000.000,00		
tumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp 0,00 Aliai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp 0,00 Biaya antara yang dikeluarkan Rp 0,00 A. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI A.1. Subsektor Angkutan Lumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan ungai/danau/penyeberangan Lumlah total kendaraan angkutan Lunit Rp 15.000.000,00 Rp 9.000.000,00 Rp 9.000.000,00		
Allai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp 0,00 Allai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 A. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI A.1. Subsektor Angkutan umlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan ungai/danau/penyeberangan umlah total kendaraan angkutan 1 Unit Aliai total transaksi pengangkutan Rp 9.000.000,00 Rp 9.000.000,00 Rp 9.000.000,00		
Aliai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Al. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI Aliai total transaksi pengangkutan I Unit I Unit Rp 15.000.000,00 Rp 9.000.000,000 Rp 0,00 Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 9.000.000,00	Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	
Aliai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Al. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI Aliai total transaksi pengangkutan I Unit I Unit Rp 15.000.000,00 Rp 9.000.000,000 Rp 0,00 Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 9.000.000,00	Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	Rp 0,00
Rp 0,00 M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI M.1. Subsektor Angkutan lumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan ungai/danau/penyeberangan lumlah total kendaraan angkutan 1 Unit kilai total transaksi pengangkutan Rp 15.000.000,00 Rp 9.000.000,00	Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	
M.1. Subsektor Angkutan Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan ungai/danau/penyeberangan Jumlah total kendaraan angkutan Junit Rp 15.000.000,00 Rp 9.000.000,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
M.1. Subsektor Angkutan Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan zungai/danau/penyeberangan Jumlah total kendaraan angkutan 1 Unit Jilai total transaksi pengangkutan Rp 15.000.000,00 Rp 9.000.000,00		1 -7
M.1. Subsektor Angkutan Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan zungai/danau/penyeberangan Jumlah total kendaraan angkutan 1 Unit Jilai total transaksi pengangkutan Rp 15.000.000,00 Rp 9.000.000,00	M OFKTOD ANOKUTAN DAN KOMUNIKACI	
Tumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan ungai/danau/penyeberangan 1 Unit 1	M. SEKTUK ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	
Tumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan ungai/danau/penyeberangan 1 Unit 1		
Tumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan ungai/danau/penyeberangan 1 Unit 1	M.1. Subsektor Angkutan	
tungai/danau/penyeberangan Iumlah total kendaraan angkutan Iiliai total transaksi pengangkutan Rp 15.000.000,00 Rp 9.000.000,00 Rp 9.000.000,00		
lumlah total kendaraan angkutan 1 Unit Nilai total transaksi pengangkutan Rp 15.000.000,00 Nilai total biaya yang dikeluarkan Rp 9.000.000,00	Juman jenis keyiatan penyangkutan orang dan barang dengan alat angkut Kendaraan jalah raya, laut, rei, udara, dan Isungai/danau/nenyeherangan	70 Jenis
Vilai total transaksi pengangkutan Rp 15.000.000,00 Rp 9.000.000,00 Rp 9.000.000,00		1 Unit
Aliai total biaya yang dikeluarkan Rp 9.000.000,00	·	-
I. SEKTOR LISTRIK, GAS & AIR MINUM	Nilai total biaya yang dikeluarkan	Rp 9.000.000,00
I. SEKTOR LISTRIK, GAS & AIR MINUM		
	N. SEKTOR LISTRIK, GAS & AIR MINUM	
I.1. Subsektor Listrik	N.1. Subsektor Listrik	
	Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik	0 Jenis
	Jumlah nilai produksi listrik	Rp 0,00

Jumlah total nilai transaksi	Rp 0,00
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan	Rp 0,00
N.2. Subsektor Gas	
Jumlah kegiatan penyediaan gas	0 jenis
Nilai aset produksi gas	Rp 0,00
Nilai transaksi	Rp 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp 0,00
N.3. Subsektor Air Minum	
Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran air minum	1 jenis
Nilai aset penyediaan air minum	Rp 250.000.000,00
Nilai produksi air minum	Rp 2.000.000,00
Nilai transaksi air minum	Rp 1.000.000,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp 500.000,00

IV. PENDAPATAN PERKAPITA

A. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha

A.1. Pertanian	
1. Jumlah rumah tangga	524 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	1290 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	80 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	150 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 800.000,00
A.2. Industri kecil, menengah dan besar	
1. Jumlah rumah tangga	3 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	20 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	10 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	100 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 1.000.000,00

B. PENDAPATAN RILL KELUARGA	
Jumlah Kepala Keluarga	594 KK
Jumlah Anggota Keluarga	1326 orang
Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga	Rp 700.000,00
Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja	Rp 200.000,00

V. STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR

1. Sektor Pertanian	
Petani	452 orang
Buruh Tani	60 orang
Pemilik Usaha Tani	120 orang
2. Sektor Perkebunan	
Karyawan Perusahaan Perkebunan	0 orang
Buruh perkebunan	0 orang
Pemilik usaha Perkebunan	0 orang
3. Sektor Peternakan	
Peternakan Perorangan	62 orang
Buruh Usaha Peternakan	22 orang
Pemilik Usaha Peternakan	4 orang
4. Sektor Perikanan	
Nelayan	0 orang
Buruh Usaha Perikanan	0 orang
Pemilik Usaha Perikanan	0 orang
5. Sektor Kehutanan	
Pengumpul Hasil Hutan	0 orang
Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan	0 orang
Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan	0 orang
6. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C	
Penambang Galian C Perorangan	3 orang
Buruh Usaha Pertambangan	100 orang

/01/24, 14.36 Unit	illed Document	
Pemilik Usaha Pertambangan	3 oran	g
-		-
7. Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga		
•		
8. Sektor Industri Menengah dan Besar		
Pemilik perusahaan	0 oran	a
eriilik perusariaari	O GIAIT	9
2 0 14 · · B · · · · · · · ·		
9. Sektor Perdagangan		
Karyawan Perdagangan Hasil Bumi	20 ora	
Buruh Perdagangan Hasil Bumi	0 oran	
Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	0 oran	9
10. Sektor Jasa		
Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan	15 ora	
Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	21 ora	
Pegawai Negeri Sipil Guru swasta	14 ora	
Pensiunan PNS	20 ora 11 ora	
Sopir	8 oran	
эоріі	o oran	9
/I. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT		
A. ASET TANAH		
Fidak memiliki tanah		0 orang
Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha		450 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha		50 orang
Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha		32 orang
Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha		0 orang
Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha		0 orang
Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha		0 orang
Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha		0 orang
Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha		0 orang
Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha		0 orang
Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha		0 orang
memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha		0 orang
Memiliki tanah lebih dari 10 ha		0 orang
Jumlah total penduduk		532 orang
B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM		
		0 orang- 0 unit
C. ASET SARANA PRODUKSI		
Memiliki penggilingan padi		0 orang
Memiliki traktor		0 orang
Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian		0 orang
Memiliki kapal penangkap ikan		0 orang
Memiliki alat pengolahan hasil perikanan		0 orang
vlemiliki alat pengolahan hasil peternakan		0 orang
vlemiliki alat pengolahan hasil perkebunan		0 orang
vlemiliki alat pengolahan hasil hutan		0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan		1 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata		0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan		0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan	menengah	0 orang
		0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING		
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING Tembok		134 rumah
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING Tembok		
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING Fembok Kayu		134 rumah
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING Tembok Kayu RUMAH MENURUT LANTAI		134 rumah 160 rumah
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING Fembok Kayu RUMAH MENURUT LANTAI Keramik		134 rumah 160 rumah 61 rumah
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING Tembok Kayu RUMAH MENURUT LANTAI Keramik Gemen		134 rumah 160 rumah 61 rumah 230 rumah
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING Tembok Kayu RUMAH MENURUT LANTAI Keramik Semen Tanah		134 rumah 160 rumah 61 rumah
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING Tembok Kayu RUMAH MENURUT LANTAI Keramik Semen		134 rumah 160 rumah 61 rumah 230 rumah
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING Tembok Kayu RUMAH MENURUT LANTAI Keramik Semen Tanah RUMAH MENURUT ATAP		134 rumah 160 rumah 61 rumah 230 rumah
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING Tembok Kayu RUMAH MENURUT LANTAI Keramik Semen Tanah		134 rumah 160 rumah 61 rumah 230 rumah 30 rumah

U1/24, 14.30 U1IIIIIE	a Document
lumlah keluarga memiliki TV dan elektronik lainnya	580 Keluarga
umlah keluarga memiliki sepeda motor/sejenisnya	300 Keluarga
umlah keluarga memiliki mobil dansejenisnya	28 Keluarga
umlah keluarga memiliki ternak kecil	550 Keluarga
•	170 Keluarga
umlah keluarga yang memiliki buku tabungan bank	ŭ
umlah keluarga yang memiliki sertifikat tanah	594 Keluarga
III. PENDIDIKAN MASYARAKAT	
A. Tingkat Pendidikan Penduduk	la.
umlah penduduk buta aksara dan huruf latin	0 orang
umlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	136 orang
umlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	3 orang
umlah penduduk sedang SD/sederajat	159 orang
umlah penduduk tamat SD/sederajat	780 orang
lumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat	0 orang
lumlah penduduk sedang SLTP/sederajat	149 orang
umlah penduduk tamat SLTP/sederajat	507 orang
umlah penduduk sedang SLTA/sederajat	86 orang
umlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat	0 orang
umlah penduduk tamat SLTA/Sederajat	204 orang
umlah penduduk sedang D-1	0 orang
umlah penduduk tamat D-1	0 orang
umlah penduduk sedang D-2	132 orang
umlah penduduk tamat D-2	0 orang
umlah penduduk sedang D-3	0 orang
umlah penduduk tamat D-3	0 orang
umlah penduduk sedang S-1	10 orang
umlah penduduk tamat S-1	0 orang
umlah penduduk sedang S-2	0 orang
umlah penduduk tamat S-2	0 orang
lumlah penduduk tamat S-3	0 orang
•	
lumlah penduduk sedang SLB A	0 orang
lumlah penduduk tamat SLB A	0 orang
lumlah penduduk sedang SLB B	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB B	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB C	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB C	0 orang
Jumlah penduduk cacat fisik dan mental	0 orang
B. Wajib belajar 9 tahun	
1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun	335 orang
2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah	300 orang
3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah	35 orang
2. Garrian portaggar dola 7 To tarian yang agait ookolan	
C. Rasio Guru dan Murid	
	0
I. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak	6 orang
2. Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak	244 orang
3. Jumlah guru SD dan sederajat	20 orang
. Jumlah siswa SD dan sederajat	178 orang
5. Jumlah guru SLTP dan sederajat	12 orang
5. Jumlah siswa SLTP dan sederajat	101 orang
'. Jumlah guru SLTA/sederajat	0 orang
B. Jumlah siswa SLTA/sederajat	204 orang
). Jumlah siswa SLB	0 orang
0. Jumlah guru SLB	0 orang
D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat	
	0 unit
umlah perpustakaan desa/kelurahan	0 unit
umlah taman bacaan desa/kelurahan	0 unit
umlah perpustakaan keliling	0 unit
umlah sanggar belajar	0 unit
umlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah	0 kegiatan
umlah kelompok belajar Paket A	0 kelompok
umlah peserta ujian Paket A	0 orang
umlah kelompok belajar Paket B	0 kelompok
	0 orang
umlah Peserta ujian Paket B	T
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0 kelompok
umlah kelompok belajar Paket C	0 kelompok 0 orang
lumlah kelompok belajar Paket C lumlah peserta ujian Paket C	-
Jumlah Peserta ujian Paket B Jumlah kelompok belajar Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah lembaga kursus keterampilan Jumlah peserta kursus keterampilan	0 orang

IX. KESEHATAN MASYARAKAT	
A. Kualitas Ibu Hamil	
Jumlah ibu hamil	30 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu	30 orang 20 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit	0 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Notter Praktek	2 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek	4 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih	4 orang
Jumlah kematian ibu hamil	0 orang
Jumlah ibu hamil melahirkan	30 orang
Jumlah ibu nifas	30 orang
Jumlah kematian ibu nifas	0 orang
Jumlah ibu nifas hidup	30 orang
B. Kualitas Bayi	
Jumlah keguguran kandungan	0 orang
Jumlah bayi lahir	30 orang
Jumlah bayi lahir mati	0 orang
Jumlah bayi lahir hidup	30 orang
Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan	0 orang
Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan	0 orang
Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg	0 orang
Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental	0 orang
montai	
C. Kualitas Persalinan	
Tempat Persalinan	
Tempat persalinan Rumah Sakit Umum	20 unit
Tempat persalinan Rumah Bersalin	0 unit
Tempat persalinan Puskesmas	10 unit
Tempat persalinan Polindes	0 unit
Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak	0 unit
Tempat persalinan rumah praktek bidan	0 unit
Tempat praktek dokter	0 unit
Rumah dukun	0 unit
Rumah sendiri	0 unit
Pertolongan Persalinan	
Jumlah Persalinan ditolong Dokter	20 tindakan
Jumlah persalinan ditolong bidan	10 tindakan
Jumlah persalinan ditolong perawat	0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin	0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong keluarga	0 tindakan
D. Cakupan Imunisasi	140
Jumlah Bayi usia 2 bulan	10 orang
Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1 Jumlah bayi usia 3 bulan	10 orang 8 orang
Jumlah bayi usia 3 bulan Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2	8 orang
Jumlah bayi usia 4 bulan	2 orang
Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3	2 orang
Jumlah bayi 9 bulan	0 orang
Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak	0 orang
Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar	0 orang
E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB	'
Pasangan Usia Subur	
Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun	93 orang
Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun	503 orang
Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun	0 orang
Jumlah pasangan usia subur	363 pasangan
	363 pasangan
Jumlah pasangan usia subur Keluarga Berencana	
Jumlah pasangan usia subur Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB	0 orang
Jumlah pasangan usia subur Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik	0 orang 194 orang
Jumlah pasangan usia subur Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral	0 orang 194 orang 90 orang
Jumlah pasangan usia subur Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom	0 orang 194 orang 90 orang 22 orang
Jumlah pasangan usia subur Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil	0 orang 194 orang 90 orang 22 orang 2 orang
Jumlah pasangan usia subur Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode vasektomi	0 orang 194 orang 90 orang 22 orang 2 orang 53 orang
Jumlah pasangan usia subur Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil	0 orang 194 orang 90 orang 22 orang 2 orang

umlah pengguna metode KB obat tradisional umlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx		Unitiled Document	
umlah pengguna alat kontrasensi metode vyy		0 orang	
annan pengguna aiat kentasepsi meteue xxx		0 orang	
umlah PUS yang tidak menggunakan metode KB		0 orang	
		g	
W.L. L B 19			
. Wabah Penyakit			
Demam berdarah			
umlah kejadian dalam 1 tahun ini		1 kejadian	
umlah yang meninggal		0 kejadian	
G. Angka Harapan Hidup			
Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan		0,00 Tahun	
Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota		0,00 Tahun	
Angka Harapan Hidup Provinsi		0,00 Tahun	
Angka harapan Hidup Nasional		0,00 Tahun	
<u> </u>			
I. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih			
· · ·		0.1/-1	
. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali		0 Keluarga	
2. Jumlah keluarga pelanggan PAM		0 Keluarga	
s. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan		0 Keluarga	
. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa		0 Keluarga	
i. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran		0 Keluarga	
5. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum		0 Keluarga	
. Jumlah keluarga menggunakan air sungai		0 Keluarga	
B. Jumlah keluarga menggunakan embung		0 Keluarga	
		-	
). Jumlah keluarga yang menggunakan mata air		572 Keluarga	
0. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air		0 Keluarga	
Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sun	nber di	0 Keluarga	
ıtas			
otal jumlah keluarga		0 Keluarga	
Perilaku hidup bersih dan sehat			
Kebiasaan buang air besar			
umlah keluarga memiliki WC yang sehat		560 Keluarga	
		<u> </u>	
umlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehat		12 Keluarga	
umlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan		0 Keluarga	
umlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum		0 Keluarga	
Pola makan			
Kebiasaan penduduk makan dlm sehari 1 kali		Tidak	
Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali		Ada	
Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali		Ada	
Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali		Tidak	
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali		Tidak	
Kebiasaan berobat bila sakit			
Oukun Terlatih		Tidak ada	
Ookter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu		Sedikit	
oktor/paskesmas/martir kesenatar//perawat/bidar//posyanda		Tidak ada	
)hat tradicional dari dukun pangahatan altarnatif			
Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif			
Paranormal		Tidak ada	
Paranormal Dbat tradisional dari keluarga sendiri		Tidak ada Tidak ada	
Paranormal		Tidak ada	
Paranormal Dbat tradisional dari keluarga sendiri		Tidak ada Tidak ada	
Paranormal Dbat tradisional dari keluarga sendiri		Tidak ada Tidak ada	
Paranormal Dbat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati I. Status Gizi Balita		Tidak ada Tidak ada Sedikit	
Paranormal Dbat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati I. Status Gizi Balita Lumlah Balita		Tidak ada Tidak ada Sedikit	
Paranormal Dbat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati I. Status Gizi Balita Tumlah Balita Tumlah Balita bergizi buruk		Tidak ada Tidak ada Sedikit 180 orang 0 orang	
Paranormal Dbat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati I. Status Gizi Balita Iumlah Balita Iumlah Balita bergizi buruk Iumlah Balita bergizi baik		Tidak ada Tidak ada Sedikit 180 orang 0 orang 170 orang	
Paranormal Dbat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati I. Status Gizi Balita Iumlah Balita Iumlah Balita bergizi buruk Iumlah Balita bergizi baik Iumlah Balita bergizi kurang		Tidak ada Tidak ada Sedikit 180 orang 0 orang 170 orang 0 orang	
Paranormal Dbat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati I. Status Gizi Balita Iumlah Balita Iumlah Balita bergizi buruk Iumlah Balita bergizi baik		Tidak ada Tidak ada Sedikit 180 orang 0 orang 170 orang	
Paranormal Dbat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati I. Status Gizi Balita Iumlah Balita Iumlah Balita bergizi buruk Iumlah Balita bergizi baik Iumlah Balita bergizi kurang		Tidak ada Tidak ada Sedikit 180 orang 0 orang 170 orang 0 orang	
Paranormal Dbat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati I. Status Gizi Balita Iumlah Balita Iumlah Balita bergizi buruk Iumlah Balita bergizi baik Iumlah Balita bergizi kurang		Tidak ada Tidak ada Sedikit 180 orang 0 orang 170 orang 0 orang	
Paranormal Dbat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati I. Status Gizi Balita Iumlah Balita Iumlah Balita bergizi buruk Iumlah Balita bergizi baik Iumlah Balita bergizi kurang		Tidak ada Tidak ada Sedikit 180 orang 0 orang 170 orang 0 orang	
Paranormal Dibat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati I. Status Gizi Balita Iumlah Balita Iumlah Balita bergizi buruk Iumlah Balita bergizi baik Iumlah Balita bergizi kurang Iumlah Balita bergizi lebih I. Status Gizi Balita Iumlah Balita bergizi huruk Iumlah Balita bergizi lebih I. Jumlah Penderita Sakit tahun ini		Tidak ada Tidak ada Sedikit 180 orang 0 orang 170 orang 1 orang 10 orang	Di rawat di
Paranormal Dbat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati I. Status Gizi Balita Iumlah Balita bergizi buruk Iumlah Balita bergizi baik Iumlah Balita bergizi kurang Iumlah Balita bergizi kurang Iumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit		Tidak ada Tidak ada Sedikit 180 orang 0 orang 170 orang 0 orang	Di rawat di
Paranormal Dibat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati I. Status Gizi Balita Iumlah Balita bergizi buruk Iumlah Balita bergizi baik Iumlah Balita bergizi kurang Iumlah Balita bergizi kurang Iumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit	1 orang	Tidak ada Tidak ada Sedikit 180 orang 0 orang 170 orang 1 orang 10 orang	Rumah sakit
Paranormal Dibat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati I. Status Gizi Balita Iumlah Balita Iumlah Balita bergizi buruk Iumlah Balita bergizi baik Iumlah Balita bergizi kurang Iumlah Balita bergizi kelumlah Balita bergizi kurang Iumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit Stroke Diabetes Melitus	1 orang 1 orang	Tidak ada Tidak ada Sedikit 180 orang 0 orang 170 orang 1 orang 10 orang	Rumah sakit Rumah sakit
Paranormal Dibat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati I. Status Gizi Balita Iumlah Balita Iumlah Balita bergizi buruk Iumlah Balita bergizi baik Iumlah Balita bergizi kurang Iumlah Balita bergizi kelumlah Balita bergizi kurang Iumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit Stroke Diabetes Melitus	1 orang	Tidak ada Tidak ada Sedikit 180 orang 0 orang 170 orang 1 orang 10 orang	Rumah sakit
Paranormal Deat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati I. Status Gizi Balita Iumlah Balita Iumlah Balita bergizi buruk Iumlah Balita bergizi baik Iumlah Balita bergizi kurang Iumlah Balita bergizi lebih I. Status Gizi Balita Iumlah Balita bergizi iumuk Iumlah Balita bergizi lebih I. Status Gizi Balita Iumlah Balita bergizi lebih I. Stroke Diabetes Melitus Istroke Institution Iumlah Institution Iumlah Istroke Istroke Institution Iumlah Istroke Istroke Institution Iumlah Istroke Istroke Istroke Institution Iumlah Istroke I	1 orang 1 orang	Tidak ada Tidak ada Sedikit 180 orang 0 orang 170 orang 1 orang 10 orang	Rumah sakit Rumah sakit
Paranormal Dibat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati I. Status Gizi Balita Iumlah Balita Iumlah Balita bergizi buruk Iumlah Balita bergizi baik Iumlah Balita bergizi kurang Iumlah Balita bergizi lebih I. Status Gizi Balita Iumlah Balita bergizi buruk Iumlah Balita bergizi lebih Iumlah Balita bergizi kurang Iumlah Balita bergizi lebih I. Stroke Diabetes Melitus Asma I. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat	1 orang 1 orang	Tidak ada Tidak ada Sedikit 180 orang 0 orang 170 orang 10 orang Jumlah penderita	Rumah sakit Rumah sakit
Paranormal Deat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati I. Status Gizi Balita Iumlah Balita Iumlah Balita bergizi buruk Iumlah Balita bergizi baik Iumlah Balita bergizi kurang Iumlah Balita bergizi lebih I. Status Gizi Balita Iumlah Balita bergizi iumuk Iumlah Balita bergizi lebih I. Status Gizi Balita Iumlah Balita bergizi lebih I. Stroke Diabetes Melitus Istroke Institution Iumlah Institution Iumlah Istroke Istroke Institution Iumlah Istroke Istroke Institution Iumlah Istroke Istroke Istroke Institution Iumlah Istroke I	1 orang 1 orang	Tidak ada Tidak ada Sedikit 180 orang 0 orang 170 orang 1 orang 10 orang	Rumah sakit Rumah sakit
Paranormal Dibat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati I. Status Gizi Balita Iumlah Balita Iumlah Balita bergizi buruk Iumlah Balita bergizi baik Iumlah Balita bergizi kurang Iumlah Balita bergizi lebih I. Status Gizi Balita Iumlah Balita bergizi buruk Iumlah Balita bergizi lebih Iumlah Balita bergizi kurang Iumlah Balita bergizi lebih I. Stroke Diabetes Melitus Asma I. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat	1 orang 1 orang	Tidak ada Tidak ada Sedikit 180 orang 0 orang 170 orang 10 orang Jumlah penderita	Rumah sakit Rumah sakit
Paranormal Dibat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati I. Status Gizi Balita Iumlah Balita Iumlah Balita bergizi buruk Iumlah Balita bergizi baik Iumlah Balita bergizi kurang Iumlah Balita bergizi lebih I. Status Gizi Balita Iumlah Balita Iumlah Balita bergizi buruk Iumlah Balita bergizi lebih I. Stroke Diabetes Melitus Istroke Diabetes Melitus Istroke Diabetes Melitus I. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Iumlah MCK Umum Iumlah Posyandu	1 orang 1 orang	Tidak ada Tidak ada Sedikit 180 orang 0 orang 170 orang 10 orang Jumlah penderita	Rumah sakit Rumah sakit
Paranormal Dibat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati I. Status Gizi Balita Iumlah Balita Iumlah Balita bergizi buruk Iumlah Balita bergizi baik Iumlah Balita bergizi kurang Iumlah Balita bergizi lebih I. Status Gizi Balita Iumlah Balita bergizi buruk Iumlah Balita bergizi lebih I. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Igenis penyakit Istroke Diabetes Melitus Asma I. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Iumlah MCK Umum	1 orang 1 orang	Tidak ada Tidak ada Sedikit 180 orang 0 orang 170 orang 10 orang Jumlah penderita 0 unit 2 unit	Rumah sakit Rumah sakit

Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif	0 orang	
Jumlah kader bina keluarga balita aktif	0 orang	
Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif	0 orang	
Buku rencana kegiatan Posyandu	Diisi	
Buku data pengunjung Posyandu	Diisi	
Buku kegiatan pelayanan Posyandu	Diisi	
Buku administrasi Posyandu lainnya	4 jenis	
Jumlah kegiatan Posyandu	2 jenis	
Jumlah kader kesehatan lainnya	11 orang	
Jumlah kegiatan pengobatan gratis	0 jenis	
Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN	0 jenis	
Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan	0 jenis	
Lainnya	0 jenis	

A. Konflik SARA	0.1
Kasus konflik pada tahun ini Kasus konflik SARA pada tahun ini	0 kasus
ı	0 kasus
umlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga umlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW	0 kasus 0 kasus
· •	0 kasus 0 kasus
umlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli umlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelompok masyarakat dari desa/kelurahan lain	0 kasus
umlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelompok masyarakat dan desa/kelurahan laim umlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah	0 kasus
umlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah	Rp 0,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
umlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah	0 orang
umlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan	0 orang
umlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan	0 orang
umlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah	0 orang
umlah konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	0 kasus
umlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	0 orang
umlah kerugian material akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	Rp 0,00
umlah prasarana dan sarana yang rusak/terbakar akibat konflik Sara	0 buah
umlah rumah penduduk yang rusak/terbakar akibat konflik Sara	0 rumah
umlah korban luka akibat konflik Sara	0 orang
umlah korban meninggal akibat konflik Sara	0 orang
umlah janda akibat konflik Sara	0 orang
umlah anak yatim akibat konflik Sara	0 orang
umlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
3. Perkelahian	
asus perkelahian yang terjadi pada tahun ini	0 kasus
asus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa	0 kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah	0 kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan kerugian material	0 kasus
umlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
C. Pencurian	
Kasus pencurian dan perampokan yang terjadi tahun ini	0 kasus
Kasus pencurian/perampokan yang korbannya penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Kasus pencurian/perampokan yang pelakunya penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
umlah pencurian dengan kekerasan senjata api	0 kasus
umlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
). Penjarahan dan Penyerobotan Tanah	
umlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat	0 kasus
umlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk etempat	0 kasus
umlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya enduduk setempat	0 kasus
umlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan	
	0 orang
umlan penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi	0 orang
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0 orang
enis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini	
umlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi enis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini umlah kasus penipuan dan atau penggelapan umlah kasus sengketa warisan. jual beli dan utang piutang	0 orang
enis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini	0 orang
enis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini umlah kasus penipuan dan atau penggelapan umlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang	0 orang
enis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini umlah kasus penipuan dan atau penggelapan umlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang . Pemakaian Miras dan Narkoba	
enis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini umlah kasus penipuan dan atau penggelapan umlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang	0 orang 0 buah 0 orang

Jumlah pengedar Narkoba	0 orang
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba	0 orang
Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba	0 kasus
lumlah kasus kematian akibat Narkoba	0 kasus
lumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
lumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
difficult polara Harroba yang diadili diad diproces seedia haram	o orang
G. Prostitusi	
umlah penduduk pekerja pramu nikmat	0 orang
okalisasi prostitusi	Tidak Ada
umlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll)	0 buah
lumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi	0 kasus
lumlah pembinaan pelaku prostitusi	0 kali
lumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi	0 kali
H. Pembunuhan	
lumlah kasus pembunuhan pada tahun ini	0 orang
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat	0 kasus
Jumlah kasus bunuh diri	0 kasus
Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum	0 kasus
minum raduud rang Diprodod docara naram	U Nasus
. Penculikan	1
lumlah kasus penculikan	0 kasus
Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat	0 kasus
Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum	0 kasus
J. Kejahatan seksual	
Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara	0 kasus
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat	0 kasus
Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks	0 unit
lumlah pengemis jalanan	0 orang
Jumlah anak jalanan dan terlantar	0 orang
Jumlah manusia lanjut usia terlantar	0 orang
Jumlah orang gila/stress/cacat mental	
	0 orang
Jumlah orang cacat fisik	0 orang
Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit	
Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan	0 orang 0 orang 0 orang
Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh	0 orang 0 orang
Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh	0 orang 0 orang 0 orang
Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo	0 orang 0 orang 0 orang 0 unit
Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak	0 orang 0 orang 0 orang 0 unit 0 unit
Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah rumah singgah anak jalanan	0 orang 0 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit
Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah rumah singgah anak jalanan Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota	0 orang 0 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit
Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah rumah singgah anak jalanan Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota	0 orang 0 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang
Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah rumah singgah anak jalanan Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni bantaran sungai Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api	0 orang 0 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang 0 orang 0 orang
Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah panti asuhan anak Jumlah rumah singgah anak jalanan Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni bantaran sungai Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya	0 orang 0 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang
Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah panti asuhan anak Jumlah rumah singgah anak jalanan Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni bantaran sungai Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif	0 orang 0 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang
Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah panti asuhan anak Jumlah rumah singgah anak jalanan Jumlah rumah singgah anak jalanan Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni bantaran sungai Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun	0 orang 0 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang
Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah rumah singgah anak jalanan Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni bantaran sungai Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak piatu 0 - 18 tahun	0 orang 0 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang
Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah rumah singgah anak jalanan Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni bantaran sungai Jumlah penghuni binggiran rel kereta api Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun	0 orang 0 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 15 orang
Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah rumah singgah anak jalanan Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni bantaran sungai Jumlah penghuni binggiran rel kereta api Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah janda	0 orang 0 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 15 orang 10 orang
Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah rumah singgah anak jalanan Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni bantaran sungai Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah janda Jumlah duda	0 orang 0 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 15 orang 10 orang 40 orang
Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah rumah singgah anak jalanan Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni bantaran sungai Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah anagota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah janda Jumlah duda Jumlah duda Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran	0 orang 0 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 15 orang 10 orang 40 orang 0 orang
Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah panti asuhan anak Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni bantaran sungai Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak piatu 0 - 18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah janda Jumlah duda Jumlah duda Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/sederajat	0 orang 0 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 15 orang 10 orang 40 orang
Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah rumah singgah anak jalanan Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni bantaran sungai Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak piatu 0 - 18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun	0 orang 0 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 15 orang 10 orang 40 orang 0 orang 0 orang
Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah panti asuhan anak Jumlah rumah singgah anak jalanan Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0 - 18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun	0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 15 orang 10 orang 40 orang 0 orang 0 orang
Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah panti jompo Jumlah panti jompo Jumlah singgah anak jalanan Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0 - 18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah janda Jumlah duda Jumlah duda Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/sederajat Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/sederajat Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang	0 orang 0 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 10 orang 15 orang 10 orang 30 orang 10 orang 0 orang 10 orang
Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah panti sushan anak Jumlah panti sushan anak Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak piatu 0 - 18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/sederajat Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang	0 orang 0 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 15 orang 10 orang 30 orang 0 orang 0 orang 15 orang 10 orang 0 orang 10 orang 10 orang 10 orang
Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah rumah singgah anak jalanan Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni bantaran sungai Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak piatu 0 - 18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 3–12 tahun yang tidak sekolah di SD/sederajat Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTA/sederajat Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga	0 orang 0 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 15 orang 10 orang 30 orang 0 orang 0 orang 15 orang 10 orang 0 orang 10 orang 10 orang 10 orang
Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah panti asuhan anak Jumlah panti jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni bantaran sungai Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif Jumlah angkyatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0 - 18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0 - 18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/sederajat Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/sederajat Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/sederajat Jumlah anak vang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang Jumlah penduduk eks NAPI Jumlah penduduk eks NAPI Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjir	0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 10 orang 15 orang 10 orang 0 orang 0 orang 10 orang 10 orang 10 orang 0 orang
Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah panti asuhan anak Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni plaur hijau dan taman kota Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api Jumlah penghuni jair di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0 – 18 tahun Jumlah anak yatim piatu 10 – 18 tahun Jumlah anak yang bekerja memantu keluarga menghasilkan uang Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga Jumlah penduduk eks NAPI Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gunung berapi	0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 10 orang 15 orang 10 orang 30 orang 10 orang 0 orang 10 orang 10 orang 0 orang
Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah pranti yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah pranti jompo Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah panti asuhan anak Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0 – 18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/sederajat Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/sederajat Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga Jumlah penduduk eks NAPI Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gunung berapi Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gunung berapi Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana stunami	0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 10 orang 15 orang 10 orang 30 orang 10 orang 0 orang 15 orang 10 orang 0 orang 100 orang 100 orang 0 orang 0 orang 0 orang
Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah panti asuhan anak Jumlah panti asuhan anak Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah penghuni ilar di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0 – 18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0 – 18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak vatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak vatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak vatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak vatin piatu 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak vatin piatu 0–18 tahun Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/sederajat Jumlah anak usia 15-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/sederajat Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjir Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjir Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tsunami Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gunung berapi	0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 10 orang 15 orang 10 orang 0 orang 10 orang 10 orang 0 orang 10 orang 0 orang 100 orang 100 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang
Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah panti jompo Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah panti asuhan anak Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api Jumlah penghuni ilar di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah angogta kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak vatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak vatin piatu 0–18 tahun Jumlah anak vatin piatu 0–18 tahun Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/sederajat Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/sederajat Jumlah anak vang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang Jumlah penduduk kes NAPI Jumlah penduduk kinggal di daerah rawan bencana banjir Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi	0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 10 orang 15 orang 10 orang 40 orang 0 orang 0 orang 15 orang 10 orang 0 orang 100 orang 100 orang 0 orang
Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah panti asuhan anak Jumlah panti asuhan anak Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah penghuni ilar di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0 – 18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0 – 18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak vatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak vatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak vatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak vatin piatu 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak vatin piatu 0–18 tahun Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/sederajat Jumlah anak usia 15-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/sederajat Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjir Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjir Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tsunami Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gunung berapi	0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 10 orang 15 orang 10 orang 0 orang 10 orang 10 orang 0 orang 10 orang 0 orang 100 orang 100 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang

01/24, 14.38 Untitled Do	
Jumlah penduduk rawan bencana kelaparan	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan air bersih	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah lahan kritis dan tandus	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di kawasan padat penduduk dan kumuh	0 orang
Jumlah warga pendatang yang tidak memiliki keterangan penduduk	0 orang
Jumlah warga pendatang dan atau pekerja musiman	0 orang
L. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
Jumlah kasus kekerasan suami terhadap istri	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan istri terhadap suami	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan orang tua terhadap anak	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan anak terhadap orang tua	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan kepala keluarga terhadap anggota keluarga lainnya	0 kasus
1 0 1 00	
M. Teror dan Intimidasi	
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak dalam desa dan kelur	rahan 0 kasus
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak luar desa atau kelural	han 0 kasus
Jumlah kasus selebaran gelap dan atau isu yang bersifat teror dan ancaman untuk menimbu	ulkan ketakutan penduduk 0 kasus
Jumlah kasus terorisme yang terjadi di desa dan kelurahan tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus hasutan dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu kepada masyarakat	0 kasus
Jumlah penyelesaian kasus teror dan intimidasi serta hasutan di masyarakat baik secara ada	at maupun hukum formal 0 kasus
N. Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta	
Organisasi Siskamling	Tidak
Organisasi Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat	Ada
Jumlah RT atau sebutan lainnya yang ada Siskamlimg/Pos Ronda	7 RT
Jumlah anggota Hansip dan Linmas	30 orang
Jadwal kegiatan Siskamling dan Pos Ronda	Ada
Buku anggota Hansip dan Linmas	3 jenis
Jumlah kelompok Satuan Pengamanan (SATPAM) swasta	0 unit
Jumlah pembinaan Siskamling oleh Pengurus dan Kades/Lurah	2 kegiatan
Jumlah Pos Jaga Induk Desa/Kelurahan	4 Pos
XI. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT	
AI. REDAULATAN POLITIK WASTARARAT	
A. Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara	
Jenis kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara	0 jenis
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara	0 kegiatan
Jenis-jenis kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika	0 jenis
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika	0 kegiatan
Jenis kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya	0 jenis
Jumlah kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya	0 kegiatan

XI. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT	
A. Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara	
Jenis kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara	0 jenis
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara	0 kegiatan
Jenis-jenis kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika	0 jenis
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika	0 kegiatan
Jenis kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya	0 jenis
Jumlah kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya	0 kegiatan
Jumlah kasus warga desa/kelurahan yang minta suaka/lari ke luar negeri	0 kasus
Jumlah warga yang melintasi perbatasan ke negara tetangga secara resmi	0 orang
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi	0 orang
Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan	0 kasus
Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga	0 kasus
Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini	0 kasus
Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan	0 kasus
Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara	0 kasus
Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini	0 kasus
Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi.	0 kasus
Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya	0 kasus
Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah	0 kasus
Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan	0 kasus
Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain	0 kasus
B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi	
Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan	1 jenis
Jumlah Wajib Pajak	2096 orang
Target PBB	Rp 70.273.968,00
Realisasi PBB	100,00 %
Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB	0 tindakan
Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan	1 jenis

3/01/24, 14.38 Untitled Document	
Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	6 orang
Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	Rp 0,00
Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	90.00 %
	*
Jenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan	0 jenis
Target pungutan resmi tingkat desa/kelurahan	Rp 0,00
Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan	0,00 %
Jumlah kasus pungutan liar	0 kasus
Jumlah penyelesaian kasus pungutan liar	0 kasus
D. D. data and D. Hull	
C. Partisipasi Politik	
1. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum	
Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih	1312 orang
Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu	1312 orang
Jumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik	0 orang
Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini	0 partai
Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini	0 partai
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan	2 orang
Jumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu	0 orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden/wakil	1260 pemilih
2. Pemilihan Kepala Daerah	
Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih	1312 orang
	1250 pemilih
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Bupati/Walikota lalu	·
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Gubenur yang lalu	1240 pemilih
3. Penentuan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan	
Penentuan Jabatan Kepala Desa	Dipilih masyarakat secara langsung
'	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Papantuan Sakrataria Daga	
Penentuan Sekretaris Desa	
Penentuan Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun	
· ·	
Maga jahatan Kanala Daga	E tohun
Masa jabatan Kepala Desa	5 tahun
Penentuan Jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan termasuk Kepala Lingkungan	
4 Pemilihan BPD	
4. Pemilihan BPD	7 orang
4. Pemilihan BPD Jumlah anggota BPD	7 orang
	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa
Jumlah anggota BPD	
Jumlah anggota BPD	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa
Jumlah anggota BPD Penentuan anggota BPD	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa
Jumlah anggota BPD	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat
Jumlah anggota BPD Penentuan anggota BPD	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara
Jumlah anggota BPD Penentuan anggota BPD Pimpinan BPD	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung
Jumlah anggota BPD Penentuan anggota BPD Pimpinan BPD Pemilikan kantor/ruang kerja BPD	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung 9999
Jumlah anggota BPD Penentuan anggota BPD Pimpinan BPD	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung
Jumlah anggota BPD Penentuan anggota BPD Pimpinan BPD Pemilikan kantor/ruang kerja BPD	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung 9999 Ada
Jumlah anggota BPD Penentuan anggota BPD Pimpinan BPD Pemilikan kantor/ruang kerja BPD	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung 9999 Ada 1. Peraturan Desa 11 buah
Jumlah anggota BPD Penentuan anggota BPD Pimpinan BPD Pemilikan kantor/ruang kerja BPD	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung 9999 Ada 1. Peraturan Desa 11 buah 2. Permintaan keterangan dari Kepala
Jumlah anggota BPD Penentuan anggota BPD Pimpinan BPD Pemilikan kantor/ruang kerja BPD	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung 9999 Ada 1. Peraturan Desa 11 buah
Jumlah anggota BPD Penentuan anggota BPD Pimpinan BPD Pemilikan kantor/ruang kerja BPD	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung 9999 Ada 1. Peraturan Desa 11 buah 2. Permintaan keterangan dari Kepala
Jumlah anggota BPD Penentuan anggota BPD Pimpinan BPD Pemilikan kantor/ruang kerja BPD	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung 9999 Ada 1. Peraturan Desa 11 buah 2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 2 kali 3. Rancangan Peraturan Desa. 0 buah
Jumlah anggota BPD Penentuan anggota BPD Pimpinan BPD Pemilikan kantor/ruang kerja BPD Anggaran untuk BPD	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung 9999 Ada 1. Peraturan Desa 11 buah 2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 2 kali 3. Rancangan Peraturan Desa. 0 buah 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 0 kali
Jumlah anggota BPD Penentuan anggota BPD Pimpinan BPD Pemilikan kantor/ruang kerja BPD	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung 9999 Ada 1. Peraturan Desa 11 buah 2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 2 kali 3. Rancangan Peraturan Desa. 0 buah 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 0 kali 5. Menyatakan pendapat kepada Kepala
Jumlah anggota BPD Penentuan anggota BPD Pimpinan BPD Pemilikan kantor/ruang kerja BPD Anggaran untuk BPD	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung 9999 Ada 1. Peraturan Desa 11 buah 2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 2 kali 3. Rancangan Peraturan Desa. 0 buah 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 0 kali 5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali
Jumlah anggota BPD Penentuan anggota BPD Pimpinan BPD Pemilikan kantor/ruang kerja BPD Anggaran untuk BPD	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung 9999 Ada 1. Peraturan Desa 11 buah 2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 2 kali 3. Rancangan Peraturan Desa. 0 buah 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 0 kali 5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 6. Menyampaikan usul dan pendapat
Jumlah anggota BPD Penentuan anggota BPD Pimpinan BPD Pemilikan kantor/ruang kerja BPD Anggaran untuk BPD	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung 9999 Ada 1. Peraturan Desa 11 buah 2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 2 kali 3. Rancangan Peraturan Desa. 0 buah 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 0 kali 5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali
Jumlah anggota BPD Penentuan anggota BPD Pimpinan BPD Pemilikan kantor/ruang kerja BPD Anggaran untuk BPD	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung 9999 Ada 1. Peraturan Desa 11 buah 2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 2 kali 3. Rancangan Peraturan Desa. 0 buah 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 0 kali 5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan
Jumlah anggota BPD Penentuan anggota BPD Pimpinan BPD Pemilikan kantor/ruang kerja BPD Anggaran untuk BPD	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung 9999 Ada 1. Peraturan Desa 11 buah 2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 2 kali 3. Rancangan Peraturan Desa. 0 buah 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 0 kali 5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali
Jumlah anggota BPD Penentuan anggota BPD Pimpinan BPD Pemilikan kantor/ruang kerja BPD Anggaran untuk BPD Produk keputusan BPD tahun ini	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung 9999 Ada 1. Peraturan Desa 11 buah 2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 2 kali 3. Rancangan Peraturan Desa. 0 buah 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 0 kali 5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan
Jumlah anggota BPD Penentuan anggota BPD Pimpinan BPD Pemilikan kantor/ruang kerja BPD Anggaran untuk BPD Produk keputusan BPD tahun ini 5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung 9999 Ada 1. Peraturan Desa 11 buah 2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 2 kali 3. Rancangan Peraturan Desa. 0 buah 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 0 kali 5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan
Jumlah anggota BPD Penentuan anggota BPD Pimpinan BPD Pemilikan kantor/ruang kerja BPD Anggaran untuk BPD Produk keputusan BPD tahun ini	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung 9999 Ada 1. Peraturan Desa 11 buah 2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 2 kali 3. Rancangan Peraturan Desa. 0 buah 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 0 kali 5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan
Jumlah anggota BPD Penentuan anggota BPD Pimpinan BPD Pemilikan kantor/ruang kerja BPD Anggaran untuk BPD Produk keputusan BPD tahun ini 5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan Dasar hukum keberadaan Lembaga	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung 9999 Ada 1. Peraturan Desa 11 buah 2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 2 kali 3. Rancangan Peraturan Desa. 0 buah 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 0 kali 5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan
Jumlah anggota BPD Penentuan anggota BPD Pimpinan BPD Pemilikan kantor/ruang kerja BPD Anggaran untuk BPD Produk keputusan BPD tahun ini 5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung 9999 Ada 1. Peraturan Desa 11 buah 2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 2 kali 3. Rancangan Peraturan Desa. 0 buah 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 0 kali 5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan
Jumlah anggota BPD Penentuan anggota BPD Pimpinan BPD Pemilikan kantor/ruang kerja BPD Anggaran untuk BPD Produk keputusan BPD tahun ini 5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan Dasar hukum keberadaan Lembaga	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung 9999 Ada 1. Peraturan Desa 11 buah 2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 2 kali 3. Rancangan Peraturan Desa. 0 buah 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 0 kali 5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa 0 kali
Jumlah anggota BPD Penentuan anggota BPD Pimpinan BPD Pemilikan kantor/ruang kerja BPD Anggaran untuk BPD Produk keputusan BPD tahun ini 5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan Dasar hukum keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung 9999 Ada 1. Peraturan Desa 11 buah 2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 2 kali 3. Rancangan Peraturan Desa. 0 buah 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 0 kali 5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan
Jumlah anggota BPD Penentuan anggota BPD Pimpinan BPD Pemilikan kantor/ruang kerja BPD Anggaran untuk BPD Produk keputusan BPD tahun ini 5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan Dasar hukum keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung 9999 Ada 1. Peraturan Desa 11 buah 2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 2 kali 3. Rancangan Peraturan Desa. 0 buah 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 0 kali 5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa 0 kali
Jumlah anggota BPD Penentuan anggota BPD Pimpinan BPD Pemilikan kantor/ruang kerja BPD Anggaran untuk BPD Produk keputusan BPD tahun ini 5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan Dasar hukum keberadaan Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan Dasar hukum keberadaan Lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung 9999 Ada 1. Peraturan Desa 11 buah 2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 2 kali 3. Rancangan Peraturan Desa. 0 buah 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 0 kali 5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa 0 kali 0 unit organisasi
Jumlah anggota BPD Penentuan anggota BPD Pimpinan BPD Pemilikan kantor/ruang kerja BPD Anggaran untuk BPD Produk keputusan BPD tahun ini 5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan Dasar hukum keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan/LKK	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung 9999 Ada 1. Peraturan Desa 11 buah 2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 2 kali 3. Rancangan Peraturan Desa. 0 buah 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 0 kali 5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa 0 kali
Jumlah anggota BPD Penentuan anggota BPD Pimpinan BPD Pemilikan kantor/ruang kerja BPD Anggaran untuk BPD Produk keputusan BPD tahun ini 5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan Dasar hukum keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan/LKK	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung 9999 Ada 1. Peraturan Desa 11 buah 2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 2 kali 3. Rancangan Peraturan Desa. 0 buah 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 0 kali 5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa 0 kali 0 unit organisasi
Jumlah anggota BPD Penentuan anggota BPD Pimpinan BPD Pemilikan kantor/ruang kerja BPD Anggaran untuk BPD Produk keputusan BPD tahun ini 5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan Dasar hukum keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan/LKK Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan/LKK Pemilihan pengurus organisasi anggota	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung 9999 Ada 1. Peraturan Desa 11 buah 2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 2 kali 3. Rancangan Peraturan Desa. 0 buah 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 0 kali 5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa 0 kali 0 unit organisasi
Jumlah anggota BPD Penentuan anggota BPD Pimpinan BPD Pemilikan kantor/ruang kerja BPD Anggaran untuk BPD Produk keputusan BPD tahun ini 5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan Dasar hukum keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan/LKK Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan/LKK Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan Pemilihan pengurus LKD/LKK Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K,	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung 9999 Ada 1. Peraturan Desa 11 buah 2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 2 kali 3. Rancangan Peraturan Desa. 0 buah 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 0 kali 5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa 0 kali 0 unit organisasi
Jumlah anggota BPD Penentuan anggota BPD Pimpinan BPD Pemilikan kantor/ruang kerja BPD Anggaran untuk BPD Produk keputusan BPD tahun ini 5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan Dasar hukum keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan Kelurahan/LKK Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan/LKK Pemilihan pengurus CKD/LKK Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung 9999 Ada 1. Peraturan Desa 11 buah 2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 2 kali 3. Rancangan Peraturan Desa. 0 buah 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 0 kali 5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa 0 kali 0 unit organisasi
Jumlah anggota BPD Penentuan anggota BPD Pimpinan BPD Pemilikan kantor/ruang kerja BPD Anggaran untuk BPD Produk keputusan BPD tahun ini 5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan Dasar hukum keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan/LKK Pemilihan pengurus LKD/LKK Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung 9999 Ada 1. Peraturan Desa 11 buah 2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 2 kali 3. Rancangan Peraturan Desa. 0 buah 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 0 kali 5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa 0 kali 0 unit organisasi
Jumlah anggota BPD Penentuan anggota BPD Pimpinan BPD Pemilikan kantor/ruang kerja BPD Anggaran untuk BPD Produk keputusan BPD tahun ini 5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan Dasar hukum keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan Kelurahan/LKK Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan/LKK Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan/EKK Pemilihan pengurus Organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung 9999 Ada 1. Peraturan Desa 11 buah 2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 2 kali 3. Rancangan Peraturan Desa. 0 buah 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 0 kali 5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa 0 kali 0 unit organisasi

Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK	
Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK	0 kegiatan
Alokasi anggaran untuk LKD/LKK	Tidak
Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya	
Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK	
Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan Anggaran Kelurahan/APBD	
Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK	0,00 %
Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Urusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK	
Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK	
	1

C. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN		
1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan		
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat dusun dan lingkungan	4 kali	
Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan	60,00 %	
Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan	47,00 %	
Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan	13,00 %	
Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan	1,00 %	
Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan Forum Musrenbang Partisipatif	Ya	
Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di desa dan Kelurahan	Ya	
Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang partisipatif	Ya	
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan	6,00 %	
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat dalam RAPB-	8.00 %	
Desa	8,00 %	
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	2,00 %	
Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel	0 kegiatan	
Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K)	Ada	
Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K)	Ada	
Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di desa/kelurahan	Ada	
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa, APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi	2 . kegiatan	
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil Musrenbang	0 . kegiatan	
2. Peranserta masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan		
Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang	0,00 %	
Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah desa/kelurahan atau kabupaten/kota	0,00 %	
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai ketetapan dalam APB-Desa	0 kegiatan	
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah	0 kegiatan	
Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang	0,00 %	
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan	0,00 %	
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan	0,00 %	
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat	0,00 %	
Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada		
Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya.		
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah	0 kasus	
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan	0 kasus	
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum	0 kasus	
Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan	0 Jenis	
Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan	0 kegiatan	
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota	0 kegiatan	
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi	0 kegiatan	
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN	0 kegiatan	
3. Semangat Kegotongroyongan Penduduk	1	
Jumlah kelompok arisan	3 buah	
Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh	0 orang	
Ada tidaknya dana sehat	Tidak	
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah	Ada	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan	da idak da idak da da idak da idak da da da da
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas data tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi	da idak da idak da da da
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi	idak da idak da da da
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi	idak da idak da da da
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan ngkungan lainnya Adat Istiadat Adat istiadat dalam perkawinan Adat istiadat dalam kelahiran anak Akadat istiadat dalam kelahiran anak	da idak da da da da
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan ngkungan lainnya Adat Istiadat Adat istiadat dalam perkawinan Adat istiadat dalam kelahiran anak Adat istiadat dalam kelahiran anak	da idak da da da da
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan ngkungan lainnya Adat Istiadat Adat istiadat dalam perkawinan Adat istiadat dalam kelahiran anak Adat istiadat dalam kelahiran anak	idak da da da da
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan ngkungan lainnya Adat Istiadat Adat istiadat dalam perkawinan Adat istiadat dalam kelahiran anak Adat istiadat dalam kelahiran anak	da da da da
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan ngkungan lainnya Adat Istiadat Adat istiadat dalam perkawinan Adat istiadat dalam kelahiran anak Adat istiadat dalam kelahiran anak	da da da
Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan ngkungan lainnya Adat Istiadat Adat istiadat dalam perkawinan Adat istiadat dalam kelahiran anak Adat istiadat dalam kelahiran anak	da da
Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan ngkungan lainnya H. Adat Istiadat Adat istiadat dalam perkawinan Adat istiadat dalam kelahiran anak Adat istiadat dalam kelahiran anak	da
Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan ngkungan lainnya H. Adat Istiadat Adat istiadat dalam perkawinan Adat istiadat dalam kelahiran anak Adat istiadat dalam kelahiran anak	
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan ngkungan lainnya H. Adat Istiadat Adat istiadat dalam perkawinan Adat istiadat dalam kelahiran anak Adat istiadat dalam kelahiran anak	
ngkungan lainnya I. Adat Istiadat Adat istiadat dalam perkawinan Adat istiadat dalam kelahiran anak Adat istiadat dalam kelahiran anak	da
I. Adat Istiadat Adat istiadat dalam perkawinan Adat istiadat dalam kelahiran anak Adat istiadat dalam kelahiran anak	
Adat istiadat dalam perkawinan Aldat istiadat dalam kelahiran anak Aldat istiadat dalam kelahiran anak	
Adat istiadat dalam perkawinan Aldat istiadat dalam kelahiran anak Aldat istiadat dalam kelahiran anak	
Adat istiadat dalam kelahiran anak Ak	
	ktif
	ktif
	idak
•	
	idak
Adat istiadat dalam tanah pertanian Tie	idak
Adat istiadat dalam pengelolaan laut/pantai Tid	idak
Adat istiadat dalam memecahkan konflik warga	idak
	idak
· · ·	idak
Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar Tid	idak
i. Sikap Dan Mental Masyarakat	
umlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan 0 j	jenis
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	jenis
, , ,	Jenio
erimita rimita samaangan peretangan aan raman ke raman	
Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah 1	
Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal 0	
lenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga 0 j	jenis
enis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga 0	jenis
	jenis
Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan	Jenio
	kasus
ejenisnya.	1
	kasus
Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya 0 l	kasus
1 0 /1	kasus
Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam	
oroses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan	
Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan 1	
Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat 0	
Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri 0	
Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok	
epentingan lain	
tos Kerja Penduduk	
uas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas 1	
Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi 0	
7 1 5 1 7 5	
Banyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan 0	
lumlah petani pada musim gagal tanam/panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain 0	
	
lumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain 0	
umlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain 0 Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota 1	
umlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya	
umlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya 1 Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak	
umlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya 1 Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada	
tumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya 1 Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak 1 Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada aat kelaparan dan kekeringan	
umlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada baat kelaparan dan kekeringan Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan	
tumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada bata kelaparan dan kekeringan Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan bangan/kelaparan/gagal panen	
tumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada Bata kelaparan dan kekeringan Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan Bangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu	
tumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada bata kelaparan dan kekeringan Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan bangan/kelaparan/gagal panen	
tumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada Bata kelaparan dan kekeringan Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan Bangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu	
tumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada baat kelaparan dan kekeringan Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan bangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan	
tumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada Bata kelaparan dan kekeringan Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan Bangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan	
tumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain Sanyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota Sanyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya Sebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak Sebiasaan masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada saat kelaparan dan kekeringan Sebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan sangan/kelaparan/gagal panen Sebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Sebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Sebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Sebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Oebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya	
umlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya Banyak penduduk yang mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada Bata kelaparan dan kekeringan Banyarakat telaparan/gagal panen Banyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan Bangan/kelaparan/gagal panen Banyarakat pementongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Banyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Banyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Banyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Banyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Banyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Banyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Banyarakat bermasah kabupaten/kota	
tumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya (Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada aat kelaparan dan kekeringan (Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan langan/kelaparan/gagal panen (Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah (Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan (Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan (Kebiasaan masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya (Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat PT PW Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggani	
umlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya Banyak penduduk yang mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada Bata kelaparan dan kekeringan Banyarakat telaparan/gagal panen Banyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan Bangan/kelaparan/gagal panen Banyarakat pementongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Banyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Banyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Banyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Banyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Banyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Banyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Banyarakat bermasah kabupaten/kota	
umlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya Banyak penduduk yang mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada Bata kelaparan dan kekeringan Banyarakat telaparan/gagal panen Banyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan Bangan/kelaparan/gagal panen Banyarakat pementongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Banyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Banyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Banyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Banyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Banyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Banyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Banyarakat bermasah kabupaten/kota	
tumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada aatat kelaparan dan kekeringan Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Cebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Cebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi desulitan yang dihadapi masyarakat	
tumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada aat kelaparan dan kekeringan Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Bebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi desulitan yang dihadapi masyarakat LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN	dak
umlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota 1 Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya (Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak (Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada aat kelaparan dan kekeringan (Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan yangangan/kelaparan/gagal panen (Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu (Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah (Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan (Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan (Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi desulitan yang dihadapi masyarakat (KII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN (Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK (Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK	idak enis

	Ada Ada dan Aktif 4
I. Posyandu Kepengurusan Buku Administrasi Jumlah kegiatan 2. Organisasi Pemuda	Ada dan Aktif 4
Kepengurusan Buku Administrasi Jumlah kegiatan 2. Organisasi Pemuda	Ada dan Aktif 4
Buku Administrasi Jumlah kegiatan 2. Organisasi Pemuda	4
Jumlah kegiatan 2. Organisasi Pemuda	4
2. Organisasi Pemuda	
2. Organisasi Pemuda	2 Jenis
-	Ada
Kepengurusan	Ada dan Aktif
Buku Administrasi	2
Jumlah kegiatan	2 Jenis
J	
Dulyun Tatanana (DT)	Ada
3. Rukun Tetangga (RT)	
Kepengurusan	Ada dan Aktif
Buku Administrasi	1
Jumlah kegiatan	2 Jenis
4. Rukun Warga (RW)	Ada
Kepengurusan	Ada dan Aktif
Buku Administrasi	0
Jumlah kegiatan	0 Jenis
Zamian Kegiatan	O COMO
5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Ada
Kepengurusan	Ada dan Aktif
Buku Administrasi	1
Jumlah kegiatan	1 Jenis
6. LKMD/LPM/Sebutan Lain	Ada
Kepengurusan	Ada dan Aktif
Buku Administrasi	0
	0 Jenis
Jumlah kegiatan	U Jenis
7. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Ada
Kepengurusan	Ada dan Aktif
Buku Administrasi	4
Jumlah kegiatan	3 Jenis
8. Karang Taruna	Ada
Kepengurusan	Ada dan Aktif
Buku Administrasi	Ada dan Aktii
	4 1
Jumlah kegiatan	1 Jenis
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	
Dasar hukum pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan	
Dasar hukum pembentukan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	

prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_tingkat/laporan_terkini_tingkat.php?&tahun=2023&kodesa=3304150016

Jumlah informasi yang disampaikan kepala desa dan lurah tentang laporan penyelenggaraan tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa dan lurah kepada masyarakat

Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota

Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan

Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan

B. Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah

Jumlah Belanja Aparatur/pegawai

Sumber pendapatan lain yang sah dan tidakmengikat

Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan

Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa

Penyampaian laporan keterangan pertanggungan jawab Kepala Desa kepada BPD

Alokasi Dana Desa

Rp 0,00

Rp 0,00

Rp 0,00

4 jenis

Rp 423.670.000,00

Rp 333.739.500,00

Rp 950.921.969,00

U1/24, 14.36 Unitied Document	
Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat	2 jenis
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang	0 kasus
disampaikan kepada kepala desa/luran	
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang	0 kasus
diselesaikan kepala desa/lurah	o Radad
C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	
1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN	
Gedung Kantor	Ada - Baik
Jumlah ruang kerja	2 Ruang
Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya	Ada
Listrik	Ada
Air bersih	Ada
Telepon	Tidak Ada
Total Control of the	Tradit / tad
1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor	
Jumlah mesin tik	0 buah
	14 buah
Jumlah meja	
Jumlah kursi	60 buah
Jumlah almari arsip	5 buah
Komputer	10 unit
Mesin fax	0 unit
Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa	1 unit
1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	
Buku Data Peraturan Desa	Ada dan Terisi
Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah	Ada dan Terisi
Buku Administrasi Kependudukan	Ada dan Terisi
Buku Data Inventaris	Ada dan Terisi
Buku Data Aparat	Ada dan Terisi
Buku Data Tanah Kas Desa	Ada dan Terisi
Buku Administrasi Pajak dan Retribusi	Tidak Ada
Buku Data Tanah	Ada dan Terisi
Buku Laporan Pengaduan Masyarakat	Tidak Ada
Buku Agenda Ekspedisi	Ada dan Terisi
Buku Profil Desa dan Kelurahan	Ada dan Terisi
Buku Data Induk Penduduk	Ada dan Terisi
Buku Data Mutasi Penduduk	Ada dan Terisi
Buku Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan	Ada dan Terisi
Buku Registrasi Pelayanan Penduduk	Ada dan Terisi
· · ·	
Buku Data Penduduk Sementara	Ada dan Terisi
Buku Anggaran Penerimaan	Ada dan Terisi
Buku Anggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan Buku Kas Umum	Ada dan Terisi
	Ada dan Terisi
Buku Kas Pembantu Penerimaan	Ada dan Terisi
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan	Ada dan Terisi
Buku Data Lembaga Kemasyarakatan	Ada dan Terisi
2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD	
Gedung Kantor	0
Jumlah ruang kerja	0 Ruang
Balai BPD	0 - 0
Listrik	0
Air bersih	0
Telepon Telepon	0
·	<u> </u>
2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor	<u> </u>
Jumlah mesin tik	0 buah
•	0 buah
Jumlah meja	1
Jumlah kursi	0 buah
Jumlah almari arsip	0 buah
Komputer	0 unit
Mesin fax	0 unit
2.B. Administrasi BPD	
Buku-buku administrasi kegiatan BPD	0
Buku Buku Administrasi Keanggotaan	4
Buku kegiatan BPD	0
Buku himpunan peraturan desa	0
Buku Lainnya	0
	†
2 DDACADANA DAN CADANA DIICUM/UNC/ZUNCAN/CERUTAN LAIM	
3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN	To.
Gedung kantor atau Balai Pertemuan	0
darkal hipanamdar kamandarii ga id/lanaran tarkini tingkat/lanaran tarkini tingkat nhn20tah km20020kadaaa=22/	04450046 4

areang inventaries Multius autominativas Multius programus Ruung Perminativas Permi		
Likuta administration into kergiatian Oleris Iminish progravus O Orang Iminish progravus	Alat tulis kantor	0
Likuta administration into kergiatian Oleris Iminish progravus O Orang Iminish progravus		· ·
unish progruss Demonstrate progruss Orang Ruang Perminiana Permontrath Pusat kapada Pemerintahan Desa dan Katurahan teoforma dan standar pelakananan unusan pemerintahan Desa dan Katurahan teoforma dan standar pelakananan unusan pemerintahan Desa dan Katurahan teoforma dan standar pelakananan unusan pemerintahan Desa dan Katurahan teoforma dan standar pelakananan unusan pemerintahan Desa dan Katurahan teoforma dan standar berlatukan penbagaan dan pemerintahan pemerintahan dan atabupaten/kota kepada desa dan dan dan dan dan dan dan dan dan da		
umsih nuang kepia PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sectional dan sitanda pelakananan unsan pemerintahan Desa dan Kelurahan Sectional dan sitanda pelakananan unsan pemerintahan Desa dan Kelurahan Sectional dan sitanda pelakananan unsan pemerintahan Desa dan Kelurahan Sectional dan sitanda bantuan pembingwan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan sabaptarkota kepada desa dan Ada Ada Sectional dan sitanda bantuan pembingwan dari pemerintahan Desa (kepala desa dan laurah Ada Sectional dan sitanda tanda jabatan, pakaian dinas dan aribut bagi Kepala Desa, Lurah dan Perangkat Desa/Gulvahan Ada Sectional pemerintahan dan perangkat masahan Sectional dan sitanda tanda jabatan, pakaian dinas dan aribut bagi Kepala Desa, Lurah dan Perangkat Desa/Gulvahan Makapa dan saturahan dan pemerintahan desa, keturahan, embaga kemasyarakatan dan perangkat masahan Sectional dan pengalagian pemerintahan desa, keturahan, embaga kemasyarakatan dan perangkat masahan dan seturahan Sectional dan pengalagian pemerintahan desa, keturahan dan sebarahan dalam bidang untuk kegalahan pengalagian pemerintahan desa dan kelurahan dalam bidang untuk kegalahan pengalagian penerintahan desa dan kelurahan dalam bidang kemasyarakatan dan perangkat masahan pengalagian pengalagian kembikanan pengalagian kembikanan pengalagian kembikanan pengalagian kembikanan pengalagian kembikanan pengalagian pengalagian pengalagian kembikanan pengalagian kembikanan pengalagian pengalag		
PERIBINANA DAN PENGAWASAN - Jenis Pembinanan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Katurahan **Teodoman dan standar pelakananan urusan pemerintahan desa, katurahan, lembaga kemasyarakatan **Pembenan dan standar pelakananan urusan pemerintahan desa, katurahan, lembaga kemasyarakatan **Ada *	Jenis kegiatan	
P. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Jonis Perminiana Pemerintiah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pederama dan standar perkasanaan urusan pemerintahan Desa dan Kelurahan Pederama dan standar perkasanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan Ada deceman cumum admiristansi, tata naskah dan pelaproran bagi kepala desa dan burah Ada deceman cumum admiristansi, tata naskah dan pelaproran bagi kepala desa dan burah Ada deceman dan standar dan jebatahan pakalan cinas dan atebut bagi Kepala Desa, Lurah dan Perangkat masing umiah bimbingan, superwisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan ertap pemberuhyanan menga kemasyarakatan Desa pelaprahan pendidikan dan pelabhan tentang penyedenggarana pemerintahan desa dan kelurahan ertap pemerintahan desa dan kelurahan Decembaga kemasyarakatan Degalam menjagakan pendidikan dan pelabhan tentang penyedenggarana pemerintahan desa dan kelurahan dan dan kelurahan Decembaga kemasyarakatan Degalam menjagakan penaman dan sanara pedesankelurahan, pendagakan penaman dan sanara pedesankelurahan, penaman kelurahan penaman kelurahan dalam penyelenggaranan pemerintahan dan kelurahan yang dibigyai APPBO Dembirana Pemerintah Pervinsik kepala desa, kurah dan perangkat masing-masing Dembirana Pemerintah Pervinsik kepala Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pemerintah pengaman baga pembarakan dan pengaman kedas dan kelurahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaranan pemerintahan dan kerbaga kerasgarakatan Dembirana Pemerintah Pervinsik kepala Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pemerintah pengaman baga pembarakan dan pengaman	Jumlah pengurus	0 Orang
Johns Perminana Permerintah Pusat kopada Permerintahan Desa dan Kelurahan dekeman dan standar pelakanaan urusan permerintahan dasa, kelurahan, interbaga kemasyarakatan Ada deberama dan standar bantuan pembayaan dan pemerintahan permerintahan dan standar bantuan pembayaan dan pemerintahan permerintahan dan standar bantuan pembayaan dan pemerintahan pemerintahan permerintahan dan standar bantuan pembayaan dan pemerintahan desa dan lurah dekeman dan standar bandai pabatahan pakainan dinas dan antitut bagi Kepala desa dan lurah dekeman dan standar bandai pabatahan pamerintahan desa dan kelurahan aerta permerintahan dan pelakhan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-dan pemerintahan desa dan kelurahan aerta pemberdayaan mentahan pemerintahan desa dan kelurahan dan dan kelurahan dan pemerintahan desa dan kelurahan dan kelurahan dalam bidang kemasyarakatan. Unitah kepilaan yang terkati dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang kemasyarakatan pemerintahan perangkatan keberdayaan masyarakat. Unitah kepilaan yang terkati dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang kemasyarakatan pemerintahan pemerintahan sember kebaya dan dan kehurahan dalam bidang kemasyarakat. Unitah kepilaan yang terkati dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang kemasyarakat. Unitah kepilaan pemerintahan dan pemerintahan dalam pemerintahan sesa dan kelurahan dalam pemerintahan sesa berangan dalam pem	Jumlah ruang kerja	Ruang
Johns Perminana Permerintah Pusat kopada Permerintahan Desa dan Kelurahan dekeman dan standar pelakanaan urusan permerintahan dasa, kelurahan, interbaga kemasyarakatan Ada deberama dan standar bantuan pembayaan dan pemerintahan permerintahan dan standar bantuan pembayaan dan pemerintahan permerintahan dan standar bantuan pembayaan dan pemerintahan pemerintahan permerintahan dan standar bantuan pembayaan dan pemerintahan desa dan lurah dekeman dan standar bandai pabatahan pakainan dinas dan antitut bagi Kepala desa dan lurah dekeman dan standar bandai pabatahan pamerintahan desa dan kelurahan aerta permerintahan dan pelakhan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-dan pemerintahan desa dan kelurahan aerta pemberdayaan mentahan pemerintahan desa dan kelurahan dan dan kelurahan dan pemerintahan desa dan kelurahan dan kelurahan dalam bidang kemasyarakatan. Unitah kepilaan yang terkati dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang kemasyarakatan pemerintahan perangkatan keberdayaan masyarakat. Unitah kepilaan yang terkati dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang kemasyarakatan pemerintahan pemerintahan sember kebaya dan dan kehurahan dalam bidang kemasyarakat. Unitah kepilaan yang terkati dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang kemasyarakat. Unitah kepilaan pemerintahan dan pemerintahan dalam pemerintahan sesa dan kelurahan dalam pemerintahan sesa berangan dalam pem		
Johns Perminana Permerintah Pusat kopada Permerintahan Desa dan Kelurahan dekeman dan standar pelakanaan urusan permerintahan dasa, kelurahan, interbaga kemasyarakatan Ada deberama dan standar bantuan pembayaan dan pemerintahan permerintahan dan standar bantuan pembayaan dan pemerintahan permerintahan dan standar bantuan pembayaan dan pemerintahan pemerintahan permerintahan dan standar bantuan pembayaan dan pemerintahan desa dan lurah dekeman dan standar bandai pabatahan pakainan dinas dan antitut bagi Kepala desa dan lurah dekeman dan standar bandai pabatahan pamerintahan desa dan kelurahan aerta permerintahan dan pelakhan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-dan pemerintahan desa dan kelurahan aerta pemberdayaan mentahan pemerintahan desa dan kelurahan dan dan kelurahan dan pemerintahan desa dan kelurahan dan kelurahan dalam bidang kemasyarakatan. Unitah kepilaan yang terkati dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang kemasyarakatan pemerintahan perangkatan keberdayaan masyarakat. Unitah kepilaan yang terkati dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang kemasyarakatan pemerintahan pemerintahan sember kebaya dan dan kehurahan dalam bidang kemasyarakat. Unitah kepilaan yang terkati dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang kemasyarakat. Unitah kepilaan pemerintahan dan pemerintahan dalam pemerintahan sesa dan kelurahan dalam pemerintahan sesa berangan dalam pem		
Pedman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemayarakatan Ada deboram dan standar benkular pembayan dan pemerintah provisi dan kabupaten/kola kepada desa dan Jurah dedoram dan		
Pedeman dan standar bantuan pembayaan dan pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan lurah edeman umum administrasi, tata naskah dan pelapran bagi kepala desa dan lurah dedoman umum administrasi, tata naskah dan pelapran bagi kepala desa dan lurah dedoman pemerintah gabatan, pakalan dinas dan artibut bagi Kepala Desa, Lurah dan Perangkat DesarKeurahan Ada dedoman pemerintah pendakan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, kembaga kemasyarakatan dan perangkat masing dekanan pemerintahan desa, kelurahan, kembaga kemasyarakatan dan perangkat masing demasyarakatan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan olegatan perdidikan dan pelatihan tentang pernyedenggaraan pemerintahan dan dan keturahan dan kelurahan dalam bidang kenasyarakatan pemerintahan desa dan kelurahan dan kelurahan dalam bidang kenasyarakatan penangulangan pemerintahan desa dan kelurahan dan kelurahan dalam bidang kenasyarakatan penangulangan pemerintahan kesa dan kelurahan dalam bidang kenasyarakatan penangulangan pemerintahan kesa dan kelurahan dalam penyedenganan penangulangan pemerintahan dan kenisikan, percepata keberdayaan masyarakat, emingkalan prasarara dan sarana pedesaan/kelurahan, pemarintakan sumber daya alam dan kehurahan dalam penyedenganan dan perangkat pangkatan keberdayaan mangkarakat, emingkalan prasarasa dan sarana pedesaan/kelurahan, pemarintakan sumber daya alam dan kelurahan dalam perangkat masing-masing dalam keberdayan pemerintahan dalam perangkat masing-masing dalam penangkat penangkat masing-masing dalam penangkat penangka	Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan	
elurahan umm administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Ada Ada rekeman umm administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Ada dari BPO rekeman pendikian dan selakian bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kernasyarakatan dan perangkal Desarkeurahan Ada dari BPO rekeman pendikian dan pelakiahan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kernasyarakatan dan perangkal masing- rekeman pendikian dan pelakiahan berang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan mendapa kemasyarakatan umlah kepiatan pendikian dan pelatihan heriang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan venetitan dan pengiajan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dalam bidan pengiatan pemarangan dan sarana pedasan-kelurahan, pemarangatan sumber daya alam dan tehonopia peta peta peta dan kelurahan dalam penyelenggaraan venetitah pengian selaki budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibeyai AFEN venetitah pengian selaki budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibeyai AFEN venetitah pengian selaki budaya masyarakat bukum data, ribil a data tistadat dan lembaga adat beserta hak dan alam bidan penyelenggaraan pemerintahan dan pengian pengipan pengian pengian pengian pengian pengian pengian pengian pengi	Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan	Ada
elurahan umm administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Ada Ada rekeman umm administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Ada dari BPO rekeman pendikian dan selakian bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kernasyarakatan dan perangkal Desarkeurahan Ada dari BPO rekeman pendikian dan pelakiahan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kernasyarakatan dan perangkal masing- rekeman pendikian dan pelakiahan berang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan mendapa kemasyarakatan umlah kepiatan pendikian dan pelatihan heriang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan venetitan dan pengiajan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dalam bidan pengiatan pemarangan dan sarana pedasan-kelurahan, pemarangatan sumber daya alam dan tehonopia peta peta peta dan kelurahan dalam penyelenggaraan venetitah pengian selaki budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibeyai AFEN venetitah pengian selaki budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibeyai AFEN venetitah pengian selaki budaya masyarakat bukum data, ribil a data tistadat dan lembaga adat beserta hak dan alam bidan penyelenggaraan pemerintahan dan pengian pengipan pengian pengian pengian pengian pengian pengian pengian pengi	Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan	
wedoman dan standar Latan nakahi dan pelaparan bagi kepala desa dan lurah Ada wedoman dan standar danda jabahan, pakaian dinas dan atribub bagi Kepala Desa, Lurah dan Perangkal Desa Kelurahan anderbaga kemasyarakatan dan perangkal masing-dasing untuk bimbingan, supervisi dan konsultasi pelakaanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan 0 kegiatan umlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelakaanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan 0 kegiatan umlah kegiatan pendelahan dan pelalihan tertaran perprejerggaraan pemerintahan desa dan kelurahan 0 kegiatan umlah kegiatan pendelahan dan pelalihan tertaran penyaperangaan pemerintahan desa dan kelurahan. Demandakan dan penghagian perprejerggaraan pemerintahan dasa dan kelurahan. Demandakan pragaman dan perangkal masing perangkan dasa persasa yang dilakanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam pertyelenggaraan dan serian penghargaan atas persasa yang dilakanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam pertyelenggaraan dan perangkan dasa persasa yang dilakanakan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 0 kali veriberian penghargaan atas pertyelengaraan pemerintahan dasa dan kelurahan 1 veriberian penghargaan atas pertyelengaraan pemerintahan dasa dan kelurahan dasa dan kelurahan penghargan dari provinsi kepada Pemerintahan dasa dan kelurahan 1 veriberian penghargaan tas perturahan dari provinsi kepada Pemerintahan desa dan kelurahan dari kerapatan pemerintahan dari provinsi kepada dan pengada	kelurahan	Ada
redoman am standar fanda jabatan, paksian dinas dan ahribut begi Kepala Desa, Lurah dan Perangkal Desa/Kelurahan deria BPD redoman pendidikan dan pelabihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, iembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-making pendidikan dan pelabihan bagi pemerintahan desa, kelurahan serta pemberdayaan makipan dan pelabihan bagi pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan makipan dan pelabihan berang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan makipan dan pelabihan teriang penyelenggaraan pemerintahan dasa dan kelurahan serta pemberdayaan makipan dan pelabihan pemperangan pemerintahan dan penjelahan penyelenggaraan pemerintahan dan kelurahan dan penjelahan pengerakan pemerintahan dan kelurahan dan kelurahan pemperangan dan sera pengerakan pemerintahan dan kelurahan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing dalakukan kepala desa dan kelurahan pemerintahan dan pelabahan pemerintahan desa dan kelurahan berakala provinsi kepalakan pemerintahan dan pelabahan pemerintahan desa dan kelurahan pemerintahan dan pelabahan pemerintahan desa dan kelurahan pemerintahan dan pengalakan pemerintahan dan kembaga dan pengalakan pemerintahan dan kembaga dan berakan pemerintahan dan kembaga dan berakan pemerintahan dan kembaga dan berakan pemerintah		Ada
erta BPO ware develored pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing umaha bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan 0 kegiatan minaha bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan 0 kegiatan minaha kegiatan pendidikan dan pelatihan tertang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan 0 kegiatan minah kegiatan perindikan dan pelatihan tertang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan 0 kegiatan minah kegiatan perindikan dan pelatihan tertang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dalam bidang minaha kegiatan perindikan dan pelatihan tertang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dalam bidang minahan pemerintahan dan penyelenggaraan dan sarana pedasaan/kelurahan, pemarintahan sumber daya alam dan teknologi lapat guna, engerbangan atas pentahan yang dilakulan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 0 kali		Add
redoman pendidikan dan pelathan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing unitah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan seta pemberdayaan makaga kemasyarakatan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan dasa dan kelurahan desa dan kelurahan desa dan kelurahan desa dan kelurahan dan pengengaraan pemerintahan dasa dan kelurahan dasa dan kelurahan dalam bidang konorni kelurapa pengaparaan pemerintahan dasa dan kelurahan dasa dan kelurahan dalam bidang konorni kelurapa pengaparaan pengaparaan pengapatan pengapatan pengapatan pengapatan pengapatan kemasian pengapatan dasa dan kelurahan dasa		Ada
unisals jumbah jambahagan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan oleh kegiatan unihah kegiatan perdidikan dan pelathan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan oleh kegiatan unihah kegiatan pendidikan dan pelathan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan oleh kegiatan unihah kegiatan periteriat dengan ungaya percepatan aka akalerasia pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang konomi keluarga, penanganan bencara, peranggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, emingkalan parasaran dan sarara pedasan kelurahan pemerintahan desa dan kelurahan dalam bidang kemingkalan parasaran dan sarara pedasan kelurahan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pentasi yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing okali keminahan pemerintahan pemerintahan desa dan kelurahan delam penyelenggaraan demerintahan desa pentasi yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing okali keminahan pemerintahan pemerintahan desa dan kelurahan delam penyelenggaraan demerintahan desa dan kelurahan delam penyelenggaraan dan pemerintahan desa dan kelurahan delam penyelenggaraan dan pengan dalam pengalam peng		
unitari bribbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan okagiatan minabap kemasyarakatan unitah bribaga kemasyarakatan okagiatan penderintahan desa dan kelurahan okagiatan penderintahan dan pelabihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan okagiatan penderintahan dan pelabihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan okagiatan pengerintahan dan pelabihan tentahan pengerintahan desa dan kelurahan dalam bidang pengerintahan pengerintahan pengerintahan desa dan kelurahan dan bidang pengerintahan pengerintahan pengerintahan pengerintahan desa dan kelurahan dan pengerintahan		Ada
umbaga kenasyarakatan wilah kegilatan pendikain dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan 0 kegilatan 0 kegilatan parke kegilatan 0 kegilatan parke kegilatan parke kegilatan kesaluan parke kegilatan kesaluan parke kegilatan kesaluan parke kegilatan peremirahan bara kegilatan parke kegilatan kesaluan masyarakat hukum adal, nilal adal sisiadal dan lembaga adal beserta hak dan verikaman berikan parke kegilatan keritan parke kegilatan parke keg		
umdag kenasyarakatan india kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan venelitan dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan umlah kegiatan yang terkat dengan punyan percepatan abau aksaleran pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang kononi keluarga, peranganah bercanta, penanggulangan kemiskhan, percepatan keberdayaan masyarakat, desa dan kelurahan pengerangan pengan pengerangan pengerangan pengan bercanta, penanggulangan kemiskhan, percepatan keberdayaan masyarakat, desa dan kelurahan pengerangan abau berdagan tasa prestasi yang dilaksanakan pemerintahan dalam berkondig tejent guna, emerintahan dalam bengaga kemasyarakat di desa dan kelurahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan emerintahan dalam bengaga kemasyarakat di desa dan kelurahan desa dan kelurahan desa dan kelurahan desa penganan dari provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan **Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing **Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan dasa Kelurahan **Percerangan pendama dan pendama dan pendama desa-kelurahan **Pedorana pelaksanan pendama diministrasi, tata nasaka dian pelaksanan penanganan bencanan yang dibaya APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan **Qejatan penanganah bencana yang dibaya APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan pengadan penanganan bencanan yang dibaya APBD Provinsi yang disaya APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan **Qejatan penjadapan kemiskinan pengadakan pengambangan kekurahan yang dibaya APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan dian pengadan pengambangan sakabugatan pengada pengambangan sakabugatan yang dilakukan kepala desa, kepala desa dan kelurahan dilam pengadan atas perakasi yang disakanakan		0 kegiatan
venetitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan umlah kegiatan yang teksid dengan pupay percepatan atau kaskerisan pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang konomi keluarga, penangaman bencana, penangguliangan kamiskiman, percepatan keberdayaan masyarakat, mengkahan prasaran dan sarana pedasaan-kelurahan, pemantahan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, engembangan osoial budaya masyarakatan desa dan kelurahan yang dibayai APBO Pemberian sensia datas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing O kali Pembiranan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Zedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desakeklurahan Zedoman pelaksanaan baga sembantuan dari provinsi ke desakeklurahan Zedoman pelaksanaan pendaman dari provinsi ke desakeklurahan Zedoman pelaksanaan pendaman dari provinsi ke desakeklurahan Zedoman pelaksanaan pendaman dari perangkat masit perangkat masing-masing Zedisatin selaksanaan pendaman dari provinsi ke desakeklurahan Zedisatin penanggulangan kemiskinan yang dibiaya APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan berskala provinsi Oepistan penanggulangan kemiskinan yang dibiaya APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan penanggulangan kemiskinan yang dibiaya APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang dara kelurahan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi yang dara kelurahan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi yang dara kelurahan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi yang dara kelurahan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi yang dara kelurahan peningkatan penanggan yang dibiakkanak pepala desa dan kelurahan dalah provinsi di desa dan kelurahan penanggan yang dibiakkanak penanggan yang dibiakkanak pepala desa dan kelurahan dalah penanggan yang dibiakkanak pepala desa dan kelurahan dalah penanggan yang dibiakkanak pepala desa dan kelurahan dalah penanggan yang	lembaga kemasyarakatan	o Registari
venetitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan umlah kegiatan yang teksid dengan pupay percepatan atau kaskerisan pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang konomi keluarga, penangaman bencana, penangguliangan kamiskiman, percepatan keberdayaan masyarakat, mengkahan prasaran dan sarana pedasaan-kelurahan, pemantahan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, engembangan osoial budaya masyarakatan desa dan kelurahan yang dibayai APBO Pemberian sensia datas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing O kali Pembiranan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Zedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desakeklurahan Zedoman pelaksanaan baga sembantuan dari provinsi ke desakeklurahan Zedoman pelaksanaan pendaman dari provinsi ke desakeklurahan Zedoman pelaksanaan pendaman dari provinsi ke desakeklurahan Zedoman pelaksanaan pendaman dari perangkat masit perangkat masing-masing Zedisatin selaksanaan pendaman dari provinsi ke desakeklurahan Zedisatin penanggulangan kemiskinan yang dibiaya APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan berskala provinsi Oepistan penanggulangan kemiskinan yang dibiaya APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan penanggulangan kemiskinan yang dibiaya APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang dara kelurahan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi yang dara kelurahan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi yang dara kelurahan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi yang dara kelurahan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi yang dara kelurahan peningkatan penanggan yang dibiakkanak pepala desa dan kelurahan dalah provinsi di desa dan kelurahan penanggan yang dibiakkanak penanggan yang dibiakkanak pepala desa dan kelurahan dalah penanggan yang dibiakkanak pepala desa dan kelurahan dalah penanggan yang dibiakkanak pepala desa dan kelurahan dalah penanggan yang	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	0 kegiatan
umlah kegiatan yang terkait dangan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang komoni kelarang penanganan bencana, penangulangan kemisikana, percepatan keherdayaan masyarakat, eningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, enegnabangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibaya APSN pemberian sanksi atas pengingan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan denembaga kemasyarakatan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan besa dan kelurahan pendangan dalam pengerintah dalam pengerintah pengerintah pengerintah pengerintah dalam pengerintah pengerintah pengerintah pengerintah pengerintah pengerintah pengerintah pengerintah pengerintah pengerintahan desa dan kelurahan dalam pengerintahan desa dan kelurahan pengerintahan dan pelabihan tertiang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan desa dan kelurahan pengerian pengerintahan dan pelabihan tertiang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Qienis pengelaran pemanggulangan kemisikanal yang dibayai APSD Provinsi umtik desa dan kelurahan Qienis pengelaran pengerian pemangalan pengerian pengeriangan an saran dan pengerian pengeriangan dan kelurahan Qienis pengerian pengeriangan peng	0 1 0 7 00 1	· ·
konomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, engembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibayal APBN emberian penghargaan atas prestat yang dilaksanakan permerihahan dan eas dan kelurahan dalam penyelenggaraan emerintahan dan lembaga kemasyarakatan emerintahan dan lembaga kemasyarakatan emerintahan dan lembaga kemasyarakatan emerintahan dan lembaga kemasyarakatan penghangan permerihanan dasa dan kelurahan dalam penyelenggaraan emerintahan dasa pentahan yang dibaya dan penangan penangan penangan dasa penangan	1 0 3 1 3 00 1	Regiatari
eningkatan präsariana dan sarana pedesaan/kefurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, enigenbangan sosiab ludaya masyarakat di fesa dan kelurahan yang dibiayai APBN eneritahan den lembaga kemasyarakat di fesa dan kelurahan dalam penyelenggaraan emerintahan eneritahan den lembaga kemasyarakatan eneritahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan emerintahan bersa dan kelurahan dalam penyelenggaraan emerintahan bersa dan kelurahan dalam penyelenggaraan emerintahan bersa dan kelurahan eneritahan dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan dan penyelenggaraan dan penyelenggaraan pengeritahan desa dan kelurahan eneritahan dalam penyelenggaraan pengeritahan desakelurahan eneritahan desakelurahan eneritahan desakelurahan eneritahan pedeman dan peneritahan desakelurahan asalitasi Pelakakanaan pendeman daministrasi, lata nasakh dan pelagoran bagi kepala desa dan leurah duminah kegiatan pendidakan pelakanan pendeman dasakelurahan eneritahan desakelurahan eneritahan desakelurahan angalampan bencana yang dibayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan ojenis egiatan pendidan pendidan pendidahan dan pengeritahan pendidakan pelakahan angalampan bencana yang dibayai APBD Provinsi yang dalawah dan pelakanan ojenis egiatan pendidahan sarana dan pengeritah pendidakan pengeritahan pendidakan dan pengeritahan pendidahan ojenis egiatan pendidahan sarana dan pengeritahan pendidahan dan pengeritahan pendidahan dan pengeritahan pendidahan dan pengeritahan pengeritahan pendidahan pengeritahan pengeritahan pengeritahan pengeritahan pengeritahan pengeritahan pengeritahan dan pengeritahan dalampan sesial budaya masyarakat Pedoman pendakan dan pendayagunaan data profit desa dan kelurahan desakelurahan desakelurahan pengeritahan dalampenyakan akabat dan kelurahan dalampenyakan dalampengan pengeritahan dasakelurahan pengeritahan dasa pengeritahan dasakelurahan pengeritahan dasakelurahan pengeritahan das	Junilari Regiatari yang terkati dengan upaya percepatan atau akselerasi permangunan desa dan keluranan dalam bidang	
engeribangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibayai APBN membraina penghargaan atas presisas yang diaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 0 kali Pembrianan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan 1 dedoman pelaksanaan lugas pembartuan dari provinsi ke desa-kelurahan 2 dedoman pelaksanaan lugas pembartuan dari provinsi ke desa-kelurahan 2 dedoman pelaksanaan lugas pembartuan dari provinsi ke desa-kelurahan 3 degiatan Isalitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan awajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa-kelurahan 3 degiatan pendidikan dan pelatithan tentaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan pendengalungan kemiskan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan pengalungan kemiskan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan 4 degiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan 5 degiatan penganganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan 5 degiatan pengangan bengalungan kemiskan desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan 6 degiatan pengangan bengan dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa an kelurahan 6 degiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa an kelurahan 7 degiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profit desa dan elurahan delarah pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profit desa dan elurahan delarah pengembangan atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 8 dembarahan denebaga kemasyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga kemasyarakat hak dan webugahan desa dan kelurahan desa dan kelurahan desa dan kelurahan debaga desa demana debaga desa demana debaga desa dan		0 jenis
emberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan emerintahan dan embaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing O kali Pembinaan Pemerintah Provinsi kopada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Edoman bantuan keunagan dari provinsi ke desaikelurahan Edoman bantuan keunagan dari provinsi ke desaikelurahan 1 degiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat isiladat dan lembaga adat beserta hak dan ewajibannya dialam pelaksanan pemerintahan desaikelurahan 1 sailitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, lata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan kurah uniah kegiatan pendidikan dan pelathan tentang peryelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi ol penis kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan 1 o jenis kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan 2 penis kegiatan penipkakana pendapalan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan 3 penis kegiatan penigkatan pendapalan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan 4 penis kegiatan peningkatan pendapalan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan 5 penis kegiatan penanganan secana yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan penganan dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan penganan senangan sebagai pengangan yang dibiakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing masing ojenis bermberian senaki atas penyimpangan yang dibiakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing mesing pengananan penganan penganan penganan penganan penganan penganan penganan penganan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan demerintahan desa kemasyarakat hukum adat, nilai adat istiladat dan lembaga kemasyarakatan dan kelurahan penganan penganan penganan penganan penganan penganan peng		
emerintahan dan lembaga kemasyarakatan (i) kali Pembiranan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan (ii) kedasanan hugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan (iii) dedinan bantuan keuangan dan provinsi kemasan dari provinsi ke desa/kelurahan (iii) dedinan bantuan keuangan dan provinsi kemasan dari provinsi ke desa/kelurahan (iii) dedinan bantuan keuangan dan provinsi kemasan dari provinsi ke desa/kelurahan (iii) degiatan Isalitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat Isiadat dan lembaga adat beserta hak dan dewajibannya dalam pelakasanaan pedeman administrati, kata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah (iii) degiatan pendidikan dan pelaithan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi kegiatan penangangan pedeman administrati, kata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan kelurahan berskala provinsi kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan (iii) penis kegiatan pendipatan kelurapay ang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan (iii) penis kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan lejarahan pemanganan sosial budaya masyarakat Pedoman pendatan dan pendayagunaan data profit desa dan leurahan kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendatan dan pendayagunaan data profit desa dan leurahan pengembangan atas presisal yang dikakanakan pemerintahan dan kelurahan dalam penyelenggaraan memerintahan dan lembaga kemasyarakatan (iii) penis kemberian pengaturan kewenangan kemasan yang dikakanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan das presisal yang dikakanakan pemerintahan desa dan kelurahan (iii) penis kemberian pengaturan kewenangan kemasan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pengaturan kewenangan kemasan pemerinahan desa dan kelurahan pengaturan		
ementinan dan lembaga kemasyarakatan (memberian sainka lasa penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing () kali () kali () kemberian sainka lasa penyimpanga yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing () kali () kemberian keungan dati provinsi ke desakelurahan () kedoman bantuan keunagan dati provinsi ke desakelurahan () kegiatan Isalitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat sitadat dan lembaga adat beserta hak dan ewajibarnya dialam pelaksanaan pemerintihanan desakelurahan () kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintihan desaka dan kelurahan bersakala provinsi () kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintihan desa dan kelurahan () penis () epias () penis () pen		0 kali
Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan dedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desarkelurahan 1 dedoman bantuan keuangan dari provinsi ke desarkelurahan 1 degialan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan ewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desarkelurahan 3 desaitiasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah 4 umlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi 5 ojenis degiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan 6 ojenis degiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan 7 ojenis degiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan 8 ojenis degiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan 9 jenis degiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan 9 jenis degiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan 9 jenis degiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan 9 jenis delaturahan 9 jenis delaturahan 9 jenis delaturahan 9 jenis delaturahan 9 jenis delaturahan delaturahan dan pengembangan pemerintahan dan delaturahan kepada gelaturah kewenangan kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan 9 jenis dedoman pelaksanaan tugas pembarituan dari kabupaten/kota kepada desa 9 jenis delaturahan delaturahan pembangan untuk desa dan kelurahan delaturahan delaturahan delaturahan delaturahan delatur	<u> </u>	
redoman bankuan keuangan dari provinsi ke desa/kelurahan dejatan fasilitasi keberadaan keastuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan everijabannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan asilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah umlah kegiatan penangdulangan kemisikanan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan berskala provinsi degiatan penangalungan kemisikanan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan O jenis degiatan penangalungan kemisikanan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan O jenis degiatan penangalan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan O jenis degiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan (D jenis dejatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan dejatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan dejatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan dejatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendalaan dan pendayagunaan data profil desa dan elurahan remberian sanksi atas penyimpangan yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan emerintahan dan elmbaga kemasyarakatan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan emerintahan dan herbaga kemasyarakatan Pemberian penghargan yang dilaksanakan pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan kepala Desa Pemberian penjatan kewanangan kabupaten/kota kepada besa O jenis dedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kelurahan pengusunan peraturan darah kepada desa O jenis dedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kelurahan desa dan kelurahan O jenis dedoman teknis penyusunan peraturan desa,	Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	0 kali
redoman bankuan keuangan dari provinsi ke desa/kelurahan dejatan fasilitasi keberadaan keastuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan everijabannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan asilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah umlah kegiatan penangdulangan kemisikanan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan berskala provinsi degiatan penangalungan kemisikanan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan O jenis degiatan penangalungan kemisikanan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan O jenis degiatan penangalan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan O jenis degiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan (D jenis dejatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan dejatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan dejatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan dejatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendalaan dan pendayagunaan data profil desa dan elurahan remberian sanksi atas penyimpangan yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan emerintahan dan elmbaga kemasyarakatan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan emerintahan dan herbaga kemasyarakatan Pemberian penghargan yang dilaksanakan pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan kepala Desa Pemberian penjatan kewanangan kabupaten/kota kepada besa O jenis dedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kelurahan pengusunan peraturan darah kepada desa O jenis dedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kelurahan desa dan kelurahan O jenis dedoman teknis penyusunan peraturan desa,		
redoman bankuan keuangan dari provinsi ke desa/kelurahan dejatan fasilitasi keberadaan keastuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan everijabannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan asilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah umlah kegiatan penangdulangan kemisikanan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan berskala provinsi degiatan penangalungan kemisikanan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan O jenis degiatan penangalungan kemisikanan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan O jenis degiatan penangalan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan O jenis degiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan (D jenis dejatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan dejatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan dejatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan dejatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendalaan dan pendayagunaan data profil desa dan elurahan remberian sanksi atas penyimpangan yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan emerintahan dan elmbaga kemasyarakatan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan emerintahan dan herbaga kemasyarakatan Pemberian penghargan yang dilaksanakan pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan kepala Desa Pemberian penjatan kewanangan kabupaten/kota kepada besa O jenis dedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kelurahan pengusunan peraturan darah kepada desa O jenis dedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kelurahan desa dan kelurahan O jenis dedoman teknis penyusunan peraturan desa,	2 Dombingan Domovintah Drovinsi konada Pemerintahan Dosa dan Kalurahan	I
redoman bantuan keuangan dari provinsi (cipitan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan ewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan 1 asilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, itata naskahi dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah 1 umlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi (cipitan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan 0 jenis (cipitan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan 0 jenis (cipitan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan 0 jenis (cipitan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan elurahan elurahan (cipitan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profii desa dan elurahan elejatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profii desa dan elurahan emerintahan dalas pengembangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 0 jenis (cipitan penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 0 jenis (cipitan penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 0 jenis (cipitan) penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala Desa (cipitan penghargan penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala Desa (cipitan penghargan pengharg		Ι.
kegiatan Pelaksanan pemerintahan kesahuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan ewajibannya dalam pelaksanan pemerintahan dasa dan kelurahan berskala provinsi olegiatan penanggulangan kemiskinan yang diblayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan berskala provinsi olegiatan penanggulangan kemiskinan yang diblayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan olegiatan penanggulangan kemiskinan yang diblayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan olegiatan penanganan bencana yang diblayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan olegiatan penanganan bencana yang diblayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan olegiatan penanganan bencana yang diblayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan elegiatan pengembangan sekangan kelurahan elegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan elegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan elegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan eleurahan dalampangan sang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing olenis elembarah penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing olenis elembarah elembarah dalampan kemasyarakatan eleurahan dan lembaga kemasyarakatan elembarah dan keburahan dan lembaga kemasyarakatan elembarah elem	Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan	1
ewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan saitilasi Pelaksanaan pedoman daministrasi, lata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah umlah kepilatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi 0 kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diblayal APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan 0 jenis dejatan penanggulangan kemiskinan yang diblayal APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan 0 jenis dejatan penangkatan pendapatan keluarga yang diblayal APBD Provinsi di desa dan kelurahan 0 jenis dejatan pengadaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang diblayal APBD Provinsi di desa dan kelurahan dejatan pengadaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang diblayal APBD Provinsi di desa an kelurahan 0 jenis dejatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan 0 jenis delurahan 0 jenis demberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 0 jenis demberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 0 jenis demberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala desa dan kelurahan delam penyelenggaraan 0 jenis demberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala desa dan kelurahan delam penyelenggaraan 0 jenis demberian penghargaan atas pensebatan dan Kepala Desa 0 jenis dembarah debaga demasyarakatan 0 jenis dedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa 0 jenis dedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada urah dari kepala desa dan lurah 0 jenis dedoman tekinsi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga kemasyarakatan desa dan lurah. 0 jenis desa dan lurah. 0 jenis dejatan penjaksanaan pemerintahan desa/kelurahan pengaluangan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan 0 jenis dejatan penjaksanaan pengana pengana pengana pengana pengana pengana pengana bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota	Pedoman bantuan keuangan dari provinsi	1
ewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan saitilasi Pelaksanaan pedoman daministrasi, lata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah umlah kepilatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi 0 kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diblayal APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan 0 jenis dejatan penanggulangan kemiskinan yang diblayal APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan 0 jenis dejatan penangkatan pendapatan keluarga yang diblayal APBD Provinsi di desa dan kelurahan 0 jenis dejatan pengadaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang diblayal APBD Provinsi di desa dan kelurahan dejatan pengadaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang diblayal APBD Provinsi di desa an kelurahan 0 jenis dejatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan 0 jenis delurahan 0 jenis demberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 0 jenis demberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 0 jenis demberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala desa dan kelurahan delam penyelenggaraan 0 jenis demberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala desa dan kelurahan delam penyelenggaraan 0 jenis demberian penghargaan atas pensebatan dan Kepala Desa 0 jenis dembarah debaga demasyarakatan 0 jenis dedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa 0 jenis dedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada urah dari kepala desa dan lurah 0 jenis dedoman tekinsi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga kemasyarakatan desa dan lurah. 0 jenis desa dan lurah. 0 jenis dejatan penjaksanaan pemerintahan desa/kelurahan pengaluangan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan 0 jenis dejatan penjaksanaan pengana pengana pengana pengana pengana pengana pengana bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota	Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan	_
isalitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah (1 umlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi (2 pinis degiatan penanggulangan kemiskinan yang diblayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan (3 pinis degiatan penanganan bencana yang diblayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan (3 pinis degiatan peningkatan pendigatan keluarga yang diblayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan (3 pinis degiatan peningkatan pendapatan keluarga yang diblayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan (4 pinis degiatan peningkatan pendapatan keluarga yang diblayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan (5 pinis degiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan elurahan (6 pinis degiatan pengembangan sosial budaya masyarakatan desa, lurah dan perangkat masing-masing (6 pinis delurahan (7 pinis delurahan) (8 pinis delurahan) (9 pinis delurahan) (9 pinis delurahan dan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan (8 pinis delurahan dan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan (8 pinis demberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan desa, peraturan desa, peraturan kepala desa dan kelurahan degiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakatah ukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan dewajbannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan desa dan kelurahan desa dan kelurahan depalahan bendapatan keluarga yang dibaya		1
unlah kegiatan pendidikan dan pelaihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi O kegiatan (egiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan O jenis (egiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan O jenis (egiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan O jenis (egiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan O jenis (egiatan pemadiaan saraha dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan ekegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan (egiatan pemgembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan elurahan ekerahan sansa tas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing O jenis Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing O jenis Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian pengaturan kewanangan kabupatenkota yang diserahkan pengaturannya kepada desa O jenis Perabapan pengaturan kewanangan kabupatenkota yang diserahkan pengaturannya kepada desa O jenis Perabapan pengaturan kewanangan kabupatenkota yang diserahkan pengaturannya kepada desa O jenis Perabapan pengaturan kepada desa A kejurahan dari kebupaten/kota kepada desa durah. Perabapan pengaturan kewanangan pembangan an partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan () jenis Perabapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa dan kelurahan () jenis Perabapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa dan kelurahan () jenis Perabapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa dan kelurahan () jenis Perabapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa dan kelurahan () jenis Perabapan pendidikan		1
kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan 0 jenis cegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan 0 jenis cegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan 0 jenis cegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan o jenis cegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan cegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profii desa dan elurahan an kelurahan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 0 jenis pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan cemerintahan dan lembaga kemasyarakatan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan pemerintahan dan kepala desa dan kelurahan pengaturan kewenangan kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan pengaturan kewenangan kabupaten/Kota kepada Desa 0 jenis pendoman pelaksanaan tugas pembartuan dari kabupaten/kota kepada desa desa dan kelurahan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa dan kurah. Peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada penia desa dan kelurahan pernecanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan penaka kelurahan (penia peniakanan pembangan untuk desa dan kelurahan (peniakanan pembangan untuk desa dan kelurahan dalam pelaksanaan pemerintahan desa, kelurahan desa dan kelurahan (peniakanan peniakanan apembangan untuk desa dan kelurahan desa dan kelurahan desa dan kelurahan penangyan an daka dan pelaporan bagi kepala desa dan kelurahan peniakanan pemerintahan desa, kelurahan desa dan kelurahan penangyangan bencana yang dibayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan (penis segiatan penanganan bencana yang d		'
Legiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan ojenis legiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan ojenis legiatan penyedian sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan elurahan elurahan ojenis egiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan ojenis elurahan elurahan ojenis elurahan ojenis elurahan ojenis elurahan elurahan ojenis elurahan ojenis elurahan ojenis elurahan elurahan ojenis elurahan tugas Bupatil/Valikota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan elimpahan tugas Bupatil/Valikota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan ojenis elurahan tugas pembantuan dan kabupaten/Kota kepada desa ojenis elurahan tugas pembantuan dan kabupaten/Kota kepada desa ojenis elurahan teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada epala desa dan lurah ojenis elurahan teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan penadakananan pemerinahan desa, kepatuan kewananan pembangan ang pembangan ang peraturah desa, kepatuahan ojenis egiatan peningusunan peraturah desa, peraturah kepala desa, keputusan beraha dan berahakanan ojenis egiatan peningusuhan peraturah desa, kelurahan pelaporan bagi kepala desa dan kelurahan ojenis egiatan peningkatan pendajatan kelurahan angan mabanarakan dan pelaporan		0 kegiatan
degiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan 0 jenis elegiatan pervediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan eleurahan cegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan cegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan eleurahan cegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan eleurahan denahan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 0 jenis demerintahan dan lembaga kemasyarakatan pengemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan mererintahan dalam penyelenggaraan pengengian penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala Desa 0 jenis demerintahan dalam penyelenggaraan pengelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa 0 jenis dedoman teknis penyusunan peraturan dari kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan desa dan kelurahan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturanya kepada desa 0 jenis dedoman teknis penyusunan peraturan dasa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada pala desa dan lurah. Desa dan kelurahan dari kabupaten/kota kepada desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada pala desa dan lurah. Desa dan kelurahan desa dan keluraha	Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan	0 jenis
degiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan 0 jenis elegiatan pervediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan eleurahan cegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan cegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan eleurahan cegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan eleurahan denahan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 0 jenis demerintahan dan lembaga kemasyarakatan pengemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan mererintahan dalam penyelenggaraan pengengian penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala Desa 0 jenis demerintahan dalam penyelenggaraan pengelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa 0 jenis dedoman teknis penyusunan peraturan dari kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan desa dan kelurahan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturanya kepada desa 0 jenis dedoman teknis penyusunan peraturan dasa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada pala desa dan lurah. Desa dan kelurahan dari kabupaten/kota kepada desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada pala desa dan lurah. Desa dan kelurahan desa dan keluraha	Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan	0 jenis
legiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan elurahan elurahan wegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa an kelurahan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan elurahan pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing pemberian sanksi atas persuasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan emerintahan dan lembaga kemasyarakatan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan pemerintahan Desa dan Kelurahan pengaturahan peraturah desa, peraturah kepala desa pengaturah kewangan kabupaten/kota kepada desa pengaturahan pengaturah pengaturahan peraturah desa, peraturah kepala desa, keputusan Lurah dan peraturah derah kepada pengala desa dan lurah pengaturahan peraturah pengaturahan pengaturah	Kegiatan penjagkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan	0 ienis
elurahan (egiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa an kelurahan (egiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan elurahan vermberlan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing (o jenis vermberlan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing (o jenis vermberlan penghangaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan emerintahan dan lembaga kemasyarakatan (o jenis vermberian penghangaan atas perangkat masing-masing (o jenis vermberian penghangaan atas pembantuan dari kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa (o jenis verdoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa (o jenis verdoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada (o jenis verdoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan (o jenis verdoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan (o jenis verdoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan (o jenis verdoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan (o jenis verdoman teknis penyusunan perencanaan pembangan untuk desa (o jenis verdoman teknis penyusunan perencanaan pembangan untuk desa (o jenis verdoman teknis penyusunan partisipatif serta pengembangan adat beserta hak dan verdoman pembayaan alokasi dana perimbangan untuk desa (o jenis verdoman pendujakan pendidikan dan pelabhangan untuk desa (o jenis verdoman pendujakan) (o jenis verdoman pendujakan pendidikan dan pelabhan tertang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan (o jenis verdoman pendujakan pendujakan pendujakan pendujakan pendujakan pendujakan pendujakan pendujakan pendujakan pen		
degiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa an kelurahan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan eleurahan 0 jenis Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, turah dan perangkat masing-masing 0 jenis Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 0 jenis Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan 0 jenis Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan 0 jenis Pemberianan pemangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa 0 jenis Pendeman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa 0 jenis Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa 0 jenis Pedoman pelaksanaan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada 0 jenis Pedoman leknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada 0 jenis Pedoman leknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan 0 jenis Pedoman leknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga adat beserta hak dan pelakada dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan 0 jenis Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa dan kelurahan 1 jenis umlah kegiatan pendidikan dan pelatihah tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan 0 jenis Pengatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan 0 jenis Pengatan penanggulangan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan 0 jenis Pengatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan 0 jenis Pengatan pendaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pendayagunaan pendayagu		0 jenis
lan kelurahan degiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan delurahan pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing o jenis pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing o jenis pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing o jenis pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan emerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa O jenis Pedoman pelakuran kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada epala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Regiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan ewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pemetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa asilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan kelurahan berskala abupaten/kota dan penanggalangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan O jenis degiatan penanggalangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan O jenis degiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan O jenis degiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan O jenis degiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan O jenis degiatan penanganah bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan O jenis degiatan penang		
legiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan elurahan 0 jenis Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 0 jenis Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 0 jenis Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala desa, lurah dan kelurahan dalam penyelenggaraan penerintahan dan lembaga kemasyarakatan 0 jenis Pembanan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa 0 jenis Peretapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa 0 jenis Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa 0 jenis Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada pelaka dasa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan pesa dan kelurahan (Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa masilitasi Pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan peraturan penbiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa dan kelurahan pembiayaan alokasi dana pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan 1 jenis untuk desa dan kelurahan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan 0 jenis degiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan 0 jenis degiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan 0 jenis degiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan 0 jenis degiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan 0 jenis degiatan penanggulangan kemishan desa/kelurahan dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan pendayagan lemerintahan desa/kelurahan desa/kelurahan dan pembadaan pemerintahan desa/kelurahan desa/kelurahan dan pembadaan pemerintahan desa/kelurah		0 jenis
elurahan Ujenis Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Ojenis Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan emerintahan dan lembaga kemasyarakatan I. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Ojenis Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Ojenis Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Ojenis Pedoman teknis penyusunan peraturan dasa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada epala desa dan lurah. Pededoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan degatan kelurahan Gejatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan dewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Gijenis Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Ujenis Gejatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Ojenis Gejatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Ojenis Gejatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota vang masuk desa dan kelurahan Ojenis Gejatan penangdulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota vang masuk desa dan kelurahan Ojenis Gejatan penangdulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota desa dan kelurahan Ojenis Gejatan penangdulangan kemiskinan penadayagunaan pemerintahan desa dan kelurahan Ojenis Gejatan penangdulangan kemiskinan penadayagunaan pemerinahan desa dan kelurahan Ojenis Gejatan penangdulangan kemiskinan pemerinahan desa dan kelurahan Ojenis Gejatan penangdulan pelaksanaan pemerinahan desa/kelurahan Ojenis Gejatan penan		-
Permberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 0 jenis Permberian sanksi atas penyimpangan yang dilakusanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan emerintahan dan lembaga kemasyarakatan 0 jenis Permberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan emerintahan dan lembaga kemasyarakatan 0 jenis Permberian pengaturan kepada Lurah dan Kepala Desa 0 jenis Permberian pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa 0 jenis Perdoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa 0 jenis Perdoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada pelala desa dan lurah. 0 jenis Perdoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan pesa dan kelurahan desa dan kelurahan desa dan kelurahan desa dan kelurahan desa dan kelurahan peraturan daerah kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan penis sailitias jeekaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah 1 jenis umlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan 1 jenis umlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan 0 jenis degiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan 0 jenis degiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan 0 jenis degiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan 0 jenis degiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan 0 jenis degiatan penangakatan pemerintahan desa/kelurahan dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat desa/kelurahan dan pendayagunaan pemerintahan desa dan kelurahan 1 jenis degiatan penaksanaan pemerintahan desa/kelurahan desa d		0 ienis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan opemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 0 jenis Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan Desa dan Kelurahan 0 jenis Pemberian pengaturan kewenangan kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa 0 jenis Perdeman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa 0 jenis Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan darah kepada epala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan lesa dan kelurahan Penetahan desa/kelurahan pengaturan desa, keputusan teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan legiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan penaturan delam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan penetahan desa/kelurahan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan penetahan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan penanganahan kelurahan kegiatan penangahan kelurahan desa/kelurahan desa/kelurahan dan BPD kegiatan peningkatan pendapatan kelurahan desa/kelurahan diana dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan desa/kelurahan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan desa/kelurahan dan pendayagunaan penerintahan desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan diana p	kelurahan	0 100
Pembrinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada epala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan esa dan kelurahan Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan esa dan kelurahan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan ewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Penetapan pembiayaan alokasi dana pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala abupaten/kota Penetapan pengdulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Penetapan penggaluangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Penetapan pendapana pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Penetapan pendoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi kepala Desa, Lurah, Perangkat Pesa/Kelurahan dan BPD Penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi kepala Desa, Lurah, Perangkat Pesa/Kelurahan dan pendayagunaan pemerintahan desa/kelurahan desa/kelurahan desa/kelurahan pendapatan kelurahan pemerintahan desa/kelurahan penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakat	Danie aine andri atra province andre con alleladore lange dana dana dan province arraige arraige	
Pembrinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada epala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan esa dan kelurahan Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan esa dan kelurahan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan ewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Penetapan pembiayaan alokasi dana pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala abupaten/kota Penetapan pengdulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Penetapan penggaluangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Penetapan pendapana pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Penetapan pendoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi kepala Desa, Lurah, Perangkat Pesa/Kelurahan dan BPD Penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi kepala Desa, Lurah, Perangkat Pesa/Kelurahan dan pendayagunaan pemerintahan desa/kelurahan desa/kelurahan desa/kelurahan pendapatan kelurahan pemerintahan desa/kelurahan penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakat	Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, luran dan perangkat masing-masing	0 jenis
Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa O jenis Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa O jenis Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa O jenis Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada epala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan lesa dan kelurahan (Pedaman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan lesa dan kelurahan (Pedaman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga adat beserta hak dan pewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan (Pedaman teknis penyusunan perencanaan pemerintahan desa/kelurahan (Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa asilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Upanis desiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala abupaten/kota O jenis degiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan O jenis degiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan O jenis degiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan O jenis degiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan O jenis degiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan O jenis degiatan peningkatan pendapatan kelurahan desa/kelurahan dan pendayagunaan pemerintahan desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan O jenis degiatan penaperihatan dan pendayagunaan p		,
Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa O jenis Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa O jenis Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa O jenis Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada epala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan esa dan kelurahan O jenis Pedejatan fasilitiasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan ewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa **asilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah U jenis **asilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan kelurahan berskala abupaten/kota **degiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan O jenis **degiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan O jenis **degiatan penangganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan O jenis **degiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan O jenis **degiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan O jenis **degiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan Bewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan O jenis **degiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan Perogram dan kegiatan pendayagunaan profil desa dan kelurahan O jenis **degiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan Perogram dan kegiatan pemel	Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan	,
Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa O jenis Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa O jenis Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa O jenis Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada epala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan esa dan kelurahan O jenis Pedejatan fasilitiasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan ewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa **asilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah U jenis **asilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan kelurahan berskala abupaten/kota **degiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan O jenis **degiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan O jenis **degiatan penangganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan O jenis **degiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan O jenis **degiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan O jenis **degiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan Bewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan O jenis **degiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan Perogram dan kegiatan pendayagunaan profil desa dan kelurahan O jenis **degiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan Perogram dan kegiatan pemel		,
Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa O jenis Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa O jenis Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada epala desa dan lurah. O jenis Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan lesa dan kelurahan O jenis Penetapan pendaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Penetapan pembiayaan alokasi dana pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Penetapan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala abupaten/kota Penetapan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Penetapan penangganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Penetapan pendayaan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Penetapan pendakan dan BPD Penetapan pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Penetanan penganan desa serta anggaran kelurahan desa dan kelurahan Penetapan penganan desa serta anggaran kelurahan desa dan kelurahan desa dan kelurahan Penetapan penganan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dan penderintahan desa pengan yang dilak	Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	,
Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada penala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan lesa dan kelurahan Pededoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan lesa dan kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Penetapan pembiayaan alokasi dana pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala abupaten/kota Penetapan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Penetapan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Penetapan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Penetapan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Pesa/Kelurahan dan BPD Penetapan pendataan dan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan Penedoman pendataan dan pendayagunaan perila desa dan kelurahan Peneberian penghargaan atas perstasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dan penyelenggaraan Pemberitahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Peneberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat	Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan	
Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada penala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan lesa dan kelurahan Pededoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan lesa dan kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Penetapan pembiayaan alokasi dana pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala abupaten/kota Penetapan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Penetapan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Penetapan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Penetapan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Pesa/Kelurahan dan BPD Penetapan pendataan dan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan Penedoman pendataan dan pendayagunaan perila desa dan kelurahan Peneberian penghargaan atas perstasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dan penyelenggaraan Pemberitahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Peneberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat	Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	0 jenis
Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada epala desa dan lurah. O jenis Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Regiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan ewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan O jenis Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa asilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah 1 jenis umlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala abupaten/kota Regiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan O jenis Regiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan O jenis Regiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan O jenis Regiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan O jenis Regiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan O jenis Regiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan ewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan desa dan kelurahan desa dan kelurahan O jenis Remberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan emerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Remberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Rengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelura	Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa	0 jenis
epala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan lesa dan kelurahan O jenis	Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa	0 jenis 0 jenis 0 jenis
Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan (esa dan kelurahan) O jenis O j	Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa	0 jenis 0 jenis 0 jenis
lesa dan kelurahan (legiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan ewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan O jenis Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa asilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah 1 jenis umlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala abupaten/kota (egiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan O jenis (egiatan penangganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan (asilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat (asilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan (asilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan (asilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan (b) jenis (asilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan (c) jenis (asilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat (b) jenis (asilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan (b) jenis (asilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan (c) jenis (asilitasi keberadaan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan (c) jenis (asilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan (c) jenis	Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada	0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis
lesa dan keluranan (legiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan (lewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan (lewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan (lewajibannya dalam pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah (lipinis (lipinis	Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah.	0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis
ewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa O jenis asilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah 1 jenis U jenis O je	Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan	0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis
Penetapan penabayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Penetapan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala Penedidikan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Penetapan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Penetapan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Penetapan pendapatan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan Penetapan pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Penetapan pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Penetapan penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dan pengelenggaraan Penetapan penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dan pengelenggaraan Penetapan penghargaan lembaga kemasyarakatan Penetapan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Penetapan pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan Penetapan pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan	Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah.	0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis
Tasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 2 jenis 3 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 3 jenis 3 jenis 4 j	Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan	0 jenis
Tasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 2 jenis 3 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 3 jenis 3 jenis 4 j	Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	0 jenis
umlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala abupaten/kota Gegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Gegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Gegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Gegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Gegiatan penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Gesa/Kelurahan dan BPD Gegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan Gedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Gedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Gedoman pendataan dan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Gemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan Gemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Gemberian sanksi atas penyimpangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan Gemberian sanksi atas penyimpangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan	Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	0 jenis
abupaten/kota 0 jenis Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan 0 jenis Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan 0 jenis Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan 0 jenis Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan 0 jenis Kegiatan penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan ewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan 1 jenis Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan 1 jenis Perogram dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan 0 jenis Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 0 jenis Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 0 kasus Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan	Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa	0 jenis
Acgiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan O jenis (Acgiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan O jenis (Acgiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan O jenis (Acgiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan O jenis (Acgiatan penanganan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat O jenis (Acgiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan O jenis	Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	0 jenis
Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Gegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Gegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Gesa/Kelurahan dan BPD Gegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan ewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Gedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Gedoman pendataan dan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Gemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Gemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Gengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan	Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala	0 jenis 1 jenis
Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Gasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD Gegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan dewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Gedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Gedoman pendataan dan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Gemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan demerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Gemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Gengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan	Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota	0 jenis 1 jenis 0 jenis
asilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD (Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan ewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan (Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan (Perogram dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan (Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing (Pengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan	Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan	0 jenis 1 jenis 0 jenis 0 jenis
asilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD (Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan ewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan (Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan (Perogram dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan (Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing (Pengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan	Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota	0 jenis 1 jenis 0 jenis 0 jenis
Desa/Kelurahan dan BPD Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan ewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Perogram dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan	Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan	0 jenis 1 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis
Regiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan ewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing O kasus Pengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan	Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan	0 jenis
ewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Perogram dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing O kasus Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan	Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat	0 jenis
Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan	Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD	0 jenis
Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan 0 jenis Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing O kasus Pengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan	Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penangganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Kegiatan penangganan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan	0 jenis 1 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan upemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan upemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing upemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing upemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan	Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan d	0 jenis 1 jenis 0 jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan upemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan upemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing upemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing upemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan	Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bercana keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Kegiatan penanganan berdaman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	0 jenis 1 jenis 0 jenis
Pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan	Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan penasyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaa	0 jenis 1 jenis 0 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 0 kasus Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan	Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan	0 jenis 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis
Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan l	Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penangganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pendoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Pendoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Pendoman pendataan dan pendengaran motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan	0 jenis 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis
	Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Pesa/Kelurahan dan BPD Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan desa dan kelurahan dena pemelinaraan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa	0 jenis 1 jenis 0 jenis
sana milik desa dan sumber pendapatan daeran yang dikelola luran	Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan Pedoman pendataan dan pemerinaan motivasi desa/kelurahan berperstasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yan	0 jenis 1 jenis 0 jenis
	Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Pesai/Kelurahan dan BPD Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Program dan kegiatan peneliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam	0 jenis 1 jenis 0 jenis

4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan		
Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	1 kali	
Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan	2 kali	
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan	0 kali	
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa	0 kali	
Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan	0 kali	
Fasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan	0 kali	
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan	0 kali	
Jumlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	0 kali	
Fasilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	0 kali	
Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan.	0 kali	
Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga	0 kali	
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat	0 kali	
Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan	0 kali	
Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan serta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat	0 kali	
Jumlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya	0 kali	
Jumlah kegiatan koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.	0 kali	

KAB. BANJARNEGARA, 8 Januari 2023 SARWODADI Kecamatan Pejawaran Kabupaten KAB. BANJARNEGARA

<u>BUDI SAMPURNO</u> Kepala Desa

- Tembusan : 1. Camat Pejawaran 2. Bupati KAB. BANJARNEGARA 3. Arsip